

**STRATEGI SERIKAT TANI TUNGGUL WULUNG DALAM
PENGUPAYAAN LEGALITAS TANAH TEMPAT TINGGAL DI AREAL
PTPN XII NGRANGKAH PAWON**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:
Wicitra Gendhuk Pangesty
145120101111002



JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI SERIKAT TANI TUNGGUL WULUNG DALAM
PENGUPAYAAN LEGALITAS TANAH TEMPAT TINGGAL DI
AREAL PTPN XII NGRANGKAHPAWON

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Wicitra Gendhuk Pangesty
145120101111002

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam
ujian sarjanapada tanggal 30 Juni 2021

Pembimbing I

Ucca Arawindha, S.Sos., MA.
NIK. 2013068711182001

Pembimbing II

Anik Susanti, S.Pd.
NIP.1986091620190309

Malang, 26 Juli
2021Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si.
NIP: 197003041995031002

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wicitra Gendhuk Pangesty

NIM : 145120101111002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Strategi Serikat Tani Tunggul Wulung dalam Pengupayaan Legalitas Tanah Tempat Tinggal di Areal PTPN XII Ngrangkah Pawon** adalah benar merupakan karya sendiri.

Hal- hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 13 Juli 2021

Yang membuat pemyataan



Wicitra Gendhuk Pangesty
145120101111002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga peneliti dapat menyusun laporan ini. Laporan ini berjudul tentang “Strategi Serikat Tani Tunggul Wulung Dalam Pengupayaan Legalitas Tanah Tempat Tinggal Di Areal PTPN XII Ngrangkah Pawon”. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai strategi gerakan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan perjuangan legalitas tanah di areal PTPN XII Ngrangkah Pawon dengan memakai teori gerakan sosial perspektif komprehensif dari Mc.Adam, Mc.Carthy, dan Zald.

Dalam penyusunan laporan ini, peneliti mendapatkan banyak tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si selaku ketua jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya
2. Prof. Dr. Ir Sanggar Kanto, MS selaku pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan nasihatnya selama ini
3. Ucca Arawindha, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi ini
4. Anik Susanti, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi ini
5. Prof. Dr. Ir Sanggar Kanto, MS selaku dosen penguji laporan ini yang telah bersedia memberikan saran beserta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.SC selaku dosen penguji laporan ini yang telah bersedia memberikan saran beserta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh dosen jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya
8. Seluruh masyarakat Desa Sepawon, Pemerintah Desa Sepawon, Pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung, LSM Ratu Adil, dan BPN Kabupaten Kediri yang telah meluangkan waktu untuk proses wawancara serta pengambilan data skripsi

dan semua pihak yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri, 13 Juli 2021

ABSTRAK

Wicitra Gendhuk Pangesty. 2014. Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Strategi Serikat Tani Tunggul Wulung dalam Pengupayaan Legalitas Tanah Tempat Tinggal di Areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Pembimbing: Ucca Arrawindha,S.Sos., M.A dan Anik Susanti, S.Pd., M.Si

Penelitian ini menjelaskan tentang gerakan sosial Serikat Tani Tunggul Wulung di Desa Sepawon khususnya Dusun Badek dan Gathok dalam upaya mendapatkan legalitas tanah tempat tinggal yang masuk kedalam areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial perspektif komprehensif oleh McAdam, McCarthy, & Zald. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu untuk menganalisis lebih dalam dan terperinci bagaimana bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan legalitas tanah tempat tinggal di Dusun Badek dan Gathok yang menjadi kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat yang dikoordinir Serikat Tani Tunggul Wulung dengan pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon muncul karena perbedaan pandangan mengenai tanah perkampungan yang ditempati masyarakat. PTPN XII Ngrangkah Pawon mengklaim tanah perkampungan tersebut adalah aset PTPN karena masuk kedalam tanah HGU. Sedangkan masyarakat mempunyai pandangan lain dengan dasar sejarah sehingga menimbulkan konflik dengan pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa gerakan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung untuk mendapatkan legalitas tanah di Dusun Badek dan Gathok terdapat beberapa elemen yang saling berkaitan untuk menunjang keberhasilan gerakan, antara lain : 1. Memanfaatkan kebijakan pemerintah tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). 2. Melakukan *framing* kepada masyarakat secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan bantuan media massa, yang membentuk citra bahwa gerakan yang dilakukan adalah benar dan masyarakat selama ini dipersulit oleh negara (PTPN) dengan memanfaatkan bukti sejarah tanah Desa Sepawon. 3. Peran ketua Serikat Tani Tunggul Wulung mampu membentuk kepercayaan dan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah serta mengoptimalkan jaringan eksternal berupa pendekatan politik dan advokasi ke beberapa organisasi dan badan pemerintahan.

Kata kunci :Gerakan sosial, Sengketa Tanah, Serikat Tani Tunggul Wulung

ABSTRACT

Wicitra Gendhuk Pangesty. 2014. Department of Sociology, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Brawijaya University. The Strategy of the Serikat Tani Tunggul Wulung in Effort of Legality of Residence Land in the Area of PTPN XII Ngrangkah Pawon. Supervised: Ucca Arrawindha,S.Sos., M.A and Anik Susanti, S.Pd., M.Si

This study discusses about social movement of the Serikat Tani Tunggul Wulung in Sepawon Village, especially Badek and Gathok Hamlets in an effort to obtain the legality of residential land that is included in the PTPN XII Ngrangkah Pawon area. The theory used in this research is a comprehensive perspective social movement theory by McAdam, McCarthy, & Zald. The type and approach of this research is descriptive qualitative, namely to analyze deeper and in detail on how the form of social movements carried out by the community to obtain the legality of the land where they live in Badek and Gathok hamlets which became a case of land disputes between the community and PTPN XII Ngrangkah Pawon.

The land dispute that occurred between the community, which was coordinated by the Serikat Tani Tunggul Wulung and PTPN XII Ngrangkah Pawon, arose because of different views on the village land occupied by the community. PTPN XII Ngrangkah Pawon claims the village land is PTPN's asset because it is included in the HGU land. While the community has another view on a historical basis, causing a conflict with the PTPN XII Ngrangkah Pawon.

The results of this study found that the movement carried out by the Serikat Tani Tunggul Wulung to obtain land legality in Badek and Gathok Hamlets contained several interrelated elements to support the success of the movement, including: 1. Utilizing government policies regarding the National Agrarian Operations Project (PRONA). 2. Doing framing to the community directly through socialization or with the help of the mass media, which forms an image that the movement that is being carried out is correct and the community has been complicated by the state (PTPN) by utilizing historical evidence of the land of Sepawon Village. 3. The role of the chairman of the Serikat Tani Tunggul Wulung is able to build trust and mobilize the community to participate in submitting land certificates as well as optimizing external networks in the form of political approaches and advocacy to several organizations and government agencies.

Keywords: Social movement, Land Dispute, Serikat Tani Tunggul Wulung

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.4.1 Secara Akademis.....	7
1.4.2 Secara Praktis.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritik.....	11
2.2.1 Gerakan Sosial.....	12
2.3 Tinjauan Konseptual.....	23
2.3.1 Lembaga Swadaya Masyarakat.....	23
2.3.2 Sengketa Tanah.....	26
2.4 Alur Berpikir.....	29
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	33
3.5 Sumber Data.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.8 Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV.....	42
GAMBARAN UMUM.....	42
4.1 Deskripsi Tipologi Desa Sepawon.....	42
4.2 Permasalahan Tanah Desa Sepawon.....	46
4.3 Konflik antara Masyarakat Desa Sepawon dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon.....	50



4.4 Serikat Tani Tunggul Wulung 53

4.5 Deskripsi Aktor 54

BAB V 57

PEMBAHASAN 57

5.1 Struktur Kesempatan Politik : Peluang dan Kekhawatiran Masyarakat..... 57

5.1.1 Perubahan Struktur Politik..... 58

5.1.2 Kegagalan Tuntutan..... 62

5.1.3 Ekonomi Masyarakat dan Kekhawatiran akan digusur 64

5.2 *Framing* dari Serikat Tani Tunggul Wulung..... 65

5.2.1 Serikat Tani Tunggul Wulung adalah identitas perjuangan masyarakat 67

5.2.2 PTPN XII adalah lawan 70

5.2.3 Pengaruh *Framing* kepada Masyarakat 72

5.3 Mobilisasi Sumberdaya 73

5.3.1 Peran Sentral Ketua Serikat Tani Tunggul Wulung 74

5.4 Keterkaitan antar Strategi 82

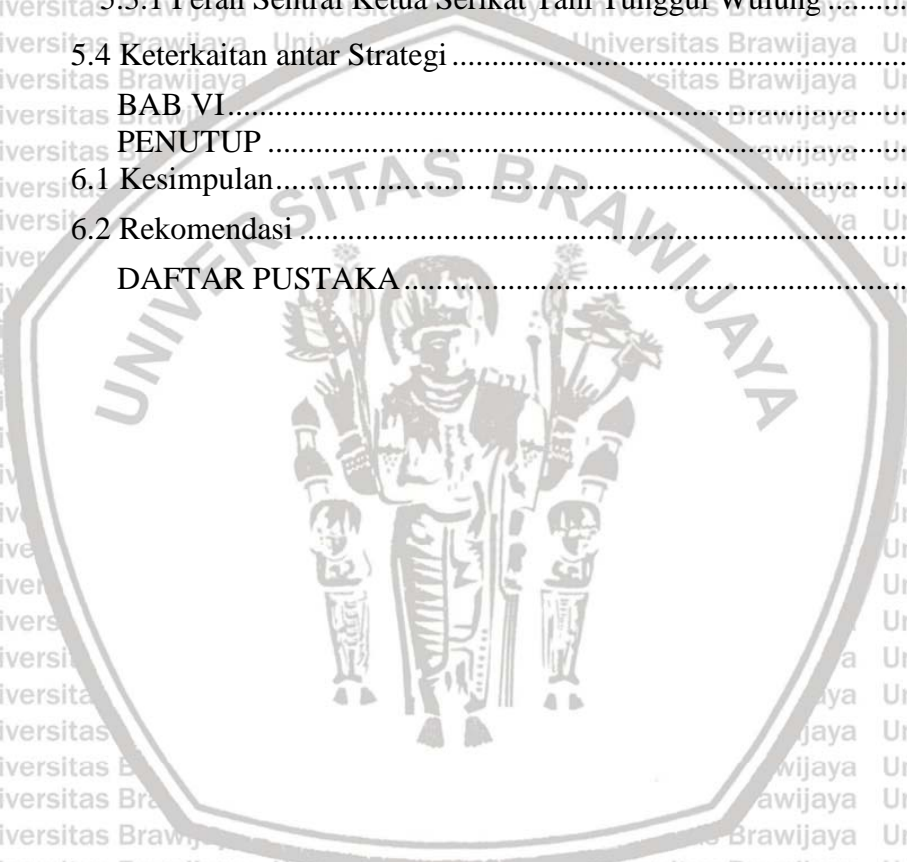
BAB VI 84

PENUTUP 84

6.1 Kesimpulan..... 84

6.2 Rekomendasi 87

DAFTAR PUSTAKA 88





DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Konflik Agraria di Indonesia 26

Tabel 2 - Tata Guna Tanah Desa Sepawon 43

Tabel 3 - Pendidikan Masyarakat Desa Sepawon 44

Tabel 4 - Mata Pencanharian Masyarakat Desa Sepawon 44

Tabel 5 - Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepawon 45

Tabel 6 - Kronologi Sejarah Tanah Desa Sepawon 47

Tabel 7 - Alat Bukti untuk Memperkuat Pengajuan dan Tuntutan 69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Kasus Konflik Agraria HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon 27

Gambar 2 - Gerbang Masuk Desa Sepawon 42

Gambar 3 - Peta Desa Sepawon 46

Gambar 4 - Capture Berita Program PRONA di Media Massa 61

Gambar 5 - Kantor Kesekretariatan Serikat Tani Tunggul Wulung 78

Gambar 6 - Bukti Pembayaran Pengajuan Sertifikat Tanah 79





DAFTAR BAGAN

Bagan 1 - Alur Berpikir..... 29

Bagan 2 - Struktur Organisasi Serikat Tani Tunggul Wulung..... 54

Bagan 3 - Faktor Kesempatan Politik 58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia masih melihat tanah mempunyai fungsi yang fundamental dalam segi kehidupan manusia. Bukan hanya dijadikan simbol kekayaan dari seseorang semata, namun juga merupakan modal dalam melakukan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam segi ekonomi tanah diperlukan dalam hal produksi baik berupa pertanian, perkebunan, maupun dalam perkembangannya sudah meliputi penjualan properti, yakni berupa rumah hunian maupun yang lainnya. Dalam segi sosial, tanah merupakan simbol dari suatu *prestise* yang berharga mampu mempengaruhi stratifikasi sosial seseorang dalam lingkungannya, orang akan dianggap kaya atau tidak tergantung berapa luas tanah yang mereka punya. Sedangkan dalam hal budaya tanah merupakan hal yang melekat dengan tradisi, bahwa tanah dilihat sebagai sesuatu yang harus diwariskan untuk anak cucu mendatang, dan kegiatan seperti ini terus dilestarikan. Inilah yang membuat fungsi tanah bukan lagi sebagai obyek mati, namun juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Indonesia mempunyai aturan yang jelas dalam mengatur sumber daya alam termasuk disini adalah tanah, baik untuk mengelola maupun mengambil manfaat dari sumber alam tersebut. Dalam pemanfaatan tanah, legalitas menjadi hal yang penting, karena sangat erat kaitannya dengan penguasaan dan pengelolaan tanah serta dengan adanya legalitas yang jelas akan meminimalisir bentuk penyerobotan tanah maupun hal – hal merugikan lainnya. Akses memperoleh legalitas status tanah di Indonesia adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, ini pun dibahas dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok – Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia Pasal 9 ayat 2, yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia laki – laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk

mendapatkan suatu hak atas tanah yang kemudian bisa mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah tersebut. Di Indonesia badan pemerintahan yang mengeluarkan status legalitas tanah kepada masyarakat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dalam mekanisme pengurusan mempunyai prosedural tertentu yang harus dipenuhi masyarakat..

Permasalahan mengenai tanah, menjadi salah satu hal yang diprioritaskan oleh pemerintah, sehingga muncullah kebijakan reforma agraria. Dalam PERPES No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria Pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang fungsi dari reforma agraria yang salah satunya mengenai penataan penguasaan tanah melalui penataan aset dan penataan akses. Dalam penataan aset salah satu implikasinya adalah mengenai legalitas tanah, yang dalam hal ini pemerintah mengupayakan permudahan mekanisme pengajuan legalitas tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Penataan aset akan meminimalisir konflik agraria yang salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya status legalitas tanah.

Walaupun undang-undang sudah mengatur secara rinci bagaimana mekanisme melegalkan tanah, namun masih banyak juga ditemukan permasalahan agraria yang muncul di Indonesia khususnya dalam permasalahan sengketa tanah yang masih alot untuk diselesaikan. Inipun terlihat dari data yakni *“Dalam basis serikat tani dan komunitas adat kedalam sistem prioritas reforma agraria (LPRA) pada tahun 2020 ada sebanyak 532 desa 654.854 hektar dengan jumlah anggota sebanyak 201.299 KK yang puluhan tahun berserikat dan masih memperjuangkan reforma agraria”* (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021) ini lah memperlihatkan bahwa kasus sengketa tanah menjadi salah satu permasalahan sosial di Indonesia, karena kuantitas permasalahan ini cukup tinggi dan kasusnya tidak semudah itu diselesaikan.

Hal yang mendasar mengenai sengketa tanah dikarenakan tidak adanya bukti legal hukum atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Permasalahan ini pun juga dialami oleh masyarakat Desa Sepawon, yakni empat

dari lima dusun belum mempunyai sertifikasi tanah, yakni Dusun Badek, Dusun Gatok, Dusun Ngrangkah, dan Dusun Sepawon. Ganjalan mengenai kepemilikan

sertifikasi tanah warga ini dikarenakan letak desa yang masuk dalam areal perkebunan PTPN XII Ngrangkah Pawon dan adanya klaim dari pihak PTPN bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat adalah aset dari PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Ada pandangan yang berbeda dari pihak PTPN dan masyarakat mengenai tanah perkampungan yang dihuni oleh warga, pihak PTPN merasa tanah tersebut merupakan aset dari PTPN XII Ngrangkah Pawon, namun masyarakat merasa bahwa tanah yang dihuni selama berpuluh – puluh tahun tersebut bukan masuk dalam daerah PTPN, karena mereka melihat dari sejarahnya yakni jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni sekitar tahun 1920 daerah yang semulanya hutan belantara itu dibabat langsung oleh warga untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat tinggal, sampai pada akhirnya ditempati secara turun temurun. Alasan lainnya yang membuat masyarakat yakin bahwa tanah tersebut adalah tanah yang seharusnya menjadi hak mereka adalah adanya penjelasan mengenai keberadaan perkampungan warga dan upaya pemberian solusi yang harus dilakukan oleh pemegang hak HGU di tanah Desa Sepawon yakni dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/87 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XII, yang menerangkan luas HGU PTPN XII tahun 1987 seluas 2,549,19 ha, dan mengecualikan lahan yang ditempati oleh warga seluas 62,12 ha (AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), 2017).

Dalam menyerukan hak mengenai kejelasan sertifikasi tanah ini lah yang membuat lahirnya kelompok Serikat Tani Tunggal Wulung pada Desember tahun 2015 yang memfokuskan diri pada proses pengajuan sertifikasi tanah, baik dengan pengoordinasian warga, pengumpulan syarat – syarat pengajuan sertifikasi, maupun melakukan kerjasama dan mediasi dengan LSM, Komnas HAM, BPN, dan KSP untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

yakni keinginan mendapatkan sertifikat tanah namun berbenturan dengan klaim tanah atas PTPN XII Ngrangkah Pawon. Hal tersebut membuat tanah yang diupayakan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan status menjadi tanah sengketa.

Terbentuknya Serikat Tani Tunggul Wulung tidak terlepas dari peran inisiator yang sekaligus menjabat sebagai ketua kelompok tersebut yakni Bapak Legimin. Dia bukan hanya aktif dalam serikat, namun juga aktif di tingkat desa, karena juga menjabat sebagai mantan kepala kampung di Dusun Badek. Dari pengalamannya tersebut itulah, dia memberanikan diri mengumpulkan beberapa orang yang satu visi dengannya, sehingga memutuskan membentuk kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung dengan membentuk identitas kelompok dengan memanfaatkan program pemerintah tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk menarik simpatisan masyarakat, karna gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang mempunyai tujuan selaras dengan program pemerintah.

Serikat Tani Tunggul Wulung ini dalam melakukan kegiatan pengupayaan legalitas tanah ini tidak mudah, karena sebelum ada Serikat Tani Tunggul Wulung, ada pengupayaan serupa yakni dua kali tuntutan dari warga khususnya warga Dusun Ngrangkah meminta tanah HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon. Namun tidak menemui titik terang dan mengalami kegagalan pada putusan Mahkamah Agung RI tahun 2013 dan tahun 2016. Sebagaimana warga merasa dirugikan karena telah dimintai biaya oprasional oleh aktor tersebut. Hal ini juga membuat tingkat kepercayaan warga khususnya di Dusun Sepawon dan Ngerangkah kepada gerakan Serikat Tani Tunggul Wulung menjadi sangat minim.

Ini dijelaskan oleh salah satu warga :

“Dulu pernah ada, tapi gagal padahal sudah dimintai uang. Rugi banyak lah. Orang yang ngurus gak tau kemana sekarang.” (wawancara 2018)

Inilah yang membuat Serikat Tani Tunggul Wulung memfokuskan diri mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengajuan sertifikat di dua dusun terdekat yakni

di Dusun Gathok dan Badek. Alasan pemfokusan mengenai dua dusun tersebut tidak lepas dari unsur politik, karena wilayah tersebut adalah basis wilayah yang pernah dipimpin oleh Ketua Serikat Tani Tunggul Wulung, yakni pernah menjadi ketua kampung, sehingga dirasa mampu untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut bergabung dalam gerakan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung satunya harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat memberikan sosialisasi pentingnya kejelasan status yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang baru yang mana masyarakat sudah merasakan nyaman dengan kondisi mereka tanpa adanya sertifikasi tanah. Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat kelompok ini melakukan musyawarah dengan mengundang kepala keluarga dan menjelaskan pentingnya kepemilikan sertifikasi tanah dan kerugian yang akan didapat masyarakat jika sewaktu – waktu masyarakat bisa diusir dari tempat tinggal mereka. Pendekatan pun bukan hanya dilakukan secara kelompok yakni memakai forum musyawarah, namun juga dilakukan secara personal kepada setiap warga.

Proses berjalannya kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung ini jika dilihat secara internal terlihat ada tokoh yang mendominasi dan mampu memobilisasi masyarakat bahkan pengurus desa (RT), hal ini tidak terlepas dari jabatan maupun *personality* yang ia miliki, yakni ketua kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung.

Sedangkan secara eksternal Serikat Tani Tunggul Wulung ini melakukan kerjasama kepada LSM Ratu Adil untuk didampingi dalam melakukan koordinasi dengan Komisi II DPRD Jawa Timur, Komnas HAM, BPN, KSP, hingga ke Staf Kepresidenan agar membantu dalam menyelesaikan permasalahan tanah di Desa Sepawon.

Penelitian dengan konteks sejenis, yang memperlihatkan konflik agraria masyarakat dengan pihak PTPN juga terjadi pada petani Rengas, ini ada ada penelitian Mohammad Syawaludin (2016) dengan judul *Perlawanan Petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera-Selatan*. Inti pada penelitian

tersebut memperlihatkan bahwa petani melakukan perjuangan perebutan lahan (reklaiming) yang sudah dikuasai oleh PTPN VII, dalam melakukan aksinya masyarakat menggunakan strategi repertoar, dengan menjaga aksi gerakan yang terus stabil. Perlawanan tersebut sudah berlangsung selama 30 tahun dan sudah melalui dua periode sistem politik yakni era Orde Baru dan era Reformasi.

Jika pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII, baik melalui konfrontasi berdarah maupun tindakan reklaiming, yang kemudian berubah menggunakan teknik repertoar. Berbeda dengan penelitian sekarang yang ingin memperlihatkan proses awal terbentuknya gerakan kolektif pengajuan sertifikat tanah di dalam masyarakat yang diinisiasi oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dengan menggunakan strategi melihat kesempatan politik, *framing*, dan mobilisasi sumber daya. Sehingga pada penelitian sekarang akan memperlihatkan secara dalam mengenai strategi mereka dalam melakukan pembentukan gerakan kolektif di dalam masyarakat, pengorganisasian di dalam kelompok, serta melakukan pemanfaatan jaringan untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena permasalahan agraria masih banyak terjadi di Indonesia, dan munculnya gerakan dari masyarakat, seperti halnya Serikat Tani Tunggul Wulung memperlihatkan bahwa masyarakat sudah kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitar mereka yang diimplementasikan dengan cara membuat kelompok gerakan sosial. Kebijakan pemerintah mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat, dan masyarakat memahami bahwa mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum yang dalam ini kaitannya adalah kepemilikan legalitas tanah. Terlepas dari munculnya gerakan – gerakan sejenis seperti ini, namun yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa adanya elite lokal yang ada di masyarakat mampu mempengaruhi cara pikir masyarakat untuk melakukan hal yang serupa seperti arahan dari aktor tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan rumusan masalah

Bagaimana Strategi Serikat Tani Tunggul Wulung Melakukan Pengupayaan Legalitas Tanah Tempat Tinggal di Areal PTPN XII Ngrangkah Pawon ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung di Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam melakukan gerakan pengajuan legalitas tanah yang ditempati oleh masyarakat yang masuk dalam areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui sejauh mana perubahan yang ditimbulkan terkait dengan adanya gerakan sosial dari kelompok tersebut.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Akademis

1. Dapat dijadikan kontribusi penelitian untuk pengembangan keilmuan khususnya mengenai gerakan sosial.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema maupun topik yang sejenis.

1.4.2 Secara Praktis

1. Untuk Pemerintah, bisa dijadikan landasan pembuatan kebijakan terkait hukum dan pertanahan secara jelas agar mampu meminimalisir permasalahan sengketa tanah yang ada di Indonesia.
2. Untuk Serikat Tani Tunggul Wulung, bisa dijadikan bahan evaluasi maupun tambahan dalam melakukan pengorganisasian gerakan sosial untuk meningkatkan keberhasilan gerakan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi pembanding corak gerakan yang berkaitan dengan konflik agraria dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini akan memperlihatkan bahwa ada beragam strategi gerakan yang bisa ditempuh yang ada di beberapa daerah.

Penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Auli Sahdin (2020), dengan judul penelitian *Gerakan Sosial Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Singkil Versus Pt. Nafasindo)*. Fokus penelitiannya mengenai gerakan sipil dalam menentang keberadaan pekebunan terjadi di Aceh, tepatnya di Aceh Singkil sejak tahun 1998 terhadap kebijakan perusahaan perkebunan PT. Ubertraco. Ada beberapa proses yang ditempuh oleh gerakan ini, mulai dari mediasi, advokasi yang dibantu LSM Gempa hingga tindakan anarkis seperti pengrusakan lahan yang di dikelola perusahaan tersebut, bahkan kegiatan demonstran dilakukan secara terus - menerus. Adanya tekanan tindakan anarkis dari masyarakat menghasilkan capaian gerakan yakni diadakannya pengukuran ulang lahan HGU Perusahaan PT. Nafasindo yang akhirnya menghasilkan keputusan mengeluarkan tanah dari HGU dan diserahkan lahan sebanyak 347 Ha kepada masyarakat dibentuknya KPPB (Koperasi Produksi Perjuangan Bersama).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Auli Sahdin memperlihatkan bagaimana corak gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Singkil memilih menggunakan tindakan agresif dan anarkis dalam upaya mencapai tujuan gerakan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan gerakan yang dilakukan pada penelitian sekarang, Serikat Tani Tunggul Wulung menghindarkan diri untuk menempuh tindakan anarkis, karena menghormati pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon dan

adanya kekhawatiran jika melakukan tindakan anarkis akan berakibat kerugian kepada masyarakat mengingat bahwa tanah yang ditempati masyarakat status kepemilikan dari hukum adalah milik PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Penelitian yang kedua yang menjadi penelitian terdahulu adalah penelitian dari Fuad Hasan (2016) dengan judul penelitian *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*. Fokus Penelitian tersebut melihat peran dari Paguyuban Petani Lahan Kulon Progo (PPLP) sebagai gerakan sosial yang memobilisasi perlawanan petani untuk menolak tambang pasir besi di Kulon Progo Yogyakarta melalui jalur advokasi.

Pada penelitian tersebut melihat konflik perebutan sumber daya alam berupa klaim status tanah antara pemerintah DIY dengan masyarakat petani Kulon Progo, sehingga dari kondisi tersebut lahirlah organisasi yang menolak tambang pasir besi yakni Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Ciri khas dari aksi yang dilakukan PPLP adalah aksi secara reaksioner, sehingga pola gerakannya tidak bisa diprediksi. Dalam pengorganisasian menerapkan sistem egaliter, dengan menerapkan azas kekeluargaan, hal ini membuat tidak ada jumlah pasti anggota tetap yang ikut bergabung dan proses jalannya tidak hanya bergantung pada arahan pemimpin organisasi tersebut.

PPLP membatasi diri dalam memilih jalan advokasi litigasi, karena mereka beranggapan bahwa jika memasuki ranah hukum maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap organisasi, karena bagi mereka hukum di Indonesia mudah dipermainkan oleh pemilik modal. Alasan jalan advokasi susah dilakukan karena di daerah Yogyakarta mayoritas masyarakatnya sangat menghormati kerajaan, sehingga akan susah jika melakukan advokasi dalam kasus ini adalah perebutan lahan antara masyarakat dan pihak pemerintah.

Jika dalam penelitian Fuad Hasan terfokus terhadap kelompok gerakan yakni PPLP serta strategi advokasi yang ditunjukkan kepada pihak lawan yang dalam hal ini adalah pemerintah, maka pada penelitian sekarang cakupan penelitiannya lebih mendalam, karena melihat proses strategi yang dimiliki oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga bisa membentuk suatu gerakan kolektif disana, namun tidak hanya melihat suatu gerakan secara internal saja, pada penelitian sekarang juga akan memperlihatkan langkah dari gerakan tersebut agar mampu mencapai tujuan mereka, yakni mendapatkan sertifikat tanah.

Penelitian terakhir yang dipilih menjadi penelitian terdahulu adalah penelitian Angga Presetyo Adi (2017) dengan judul penelitian *Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus : Gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang)*. Fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah melihat bentuk perlawanan pra reformasi dan pasca reformasi petani Kedungdendeng dalam melakukan *reclaiming* tanah milik BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ploso Barat.

Pada penelitian Angga memperlihatkan adanya konflik antara petani Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat, ini bermula dari claiming tanah yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah – tanah milik petani, dengan adanya masalah tersebut, petani Kedungdendeng melakukan perlawanan yang dibedakan melalui dua masa, yakni masa pra reformasi dengan masa pasca reformasi.

Hasil penelitian Angga terlihat adanya perubahan bentuk perlawanan yang dilakukan petani Kedungdendeng. Pada masa pra reformasi bentuk perlawanan yang dilakukan berupa pencurian pohon secara liar milik BPKH Ploso Berat, sedangkan pada masa pasca reformasi bentuk perlawanan petani berupa penguatan

dari hukum, yakni dikeluarkannya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan menggunakan pihak ketiga yakni agraria Mojokerto. Namun hal tersebut

membuat konflik baru, karena pihak BPKH merasa tidak diikutsertakan dalam pembahasan mengenai dikeluarkannya SPPT.

Jika pada penelitian Angga berfokus melihat bentuk perlawanan petani Kedungdendeng kepada BPHK dengan membedakan bentuk perlawanan dalam dua masa, yakni pra reformasi dan pasca reformasi, sedangkan pada penelitian sekarang ingin memperlihatkan munculnya tindakan kolektif berupa gerakan pengajuan sertifikat tanah dari masyarakat dengan adanya pendekatan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung. Bukan hanya memperlihatkan proses awal pembentukan gerakannya saja, namun juga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Serikat Tani Tunggul Wulung.

2.2 Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dapat digunakan peneliti untuk melakukan analisa secara mendalam terhadap tema yang telah ditentukan dan membantu menjawab rumusan masalah mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Teori yang digunakan ialah teori gerakan sosial perspektif komprehensif dari Mc.Adam, Mc.Carthy dan Zald. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut, karena peneliti merasa teori perspektif komprehensif mampu memaksimalkan analisis gerakan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung karena beberapa tindakan yang merupakan strategi gerakan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung erat dengan pemaparan perspektif komprehensif.

Dalam perspektif komprehensif menghubungkan 3 teori gerakan sosial yakni struktur kesempatan politik, *framing*, dan mobilisasi sumberdaya yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya sebuah gerakan sosial. Ketiga poin ini saling mempengaruhi satu sama lain, adanya kesempatan struktur politik yang terbuka dan sehat akan mendorong peningkatan penyampaian aspirasi dari

masyarakat baik dalam pengawasan kebijakan maupun kontrol kekuasaan, yang akhirnya berpotensi melahirkan gerakan sosial dan membuatnya berkembang.

Sedangkan disisi lain penggunaan mobilisasi sumberdaya dan *framing* akan membantu keefektifitasan sebuah gerakan. Mobilisasi sumberdaya memberikan pengaruh rasionalitas, yakni mengkalkulasi keuntungan dan kerugian dari pembentukan dan proses gerakan. Sedangkan *framing* membantu membentuk identitas yang berdampak pada penarikan simpatisan. Jadi bisa disimpulkan ketiga teori ini mempunyai pengaruh satu sama lain untuk mempengaruhi suatu gerakan yang ada dalam masyarakat (Sukmana, 2016)

2.2.1 Gerakan Sosial

Gerakan sosial mempunyai tahapan dalam pembentukannya, sehingga tidak serta merta gerakan sosial muncul secara tiba – tiba. Tidak semua tindakan kolektif yang ada di masyarakat adalah suatu gerakan sosial. Ada empat tahapan gerakan sosial menurut Macionis dalam (Sukmana, 2016, hal. 26-27) yakni :

1. *Emergence* (tahap kemunculan)

Pada tahap ini, gerakan sosial muncul karena adanya pandangan bahwa ada sesuatu yang tidak baik atau tidak semestinya sehingga harus ada perubahan dalam aspek tersebut. Tahap ini memunculkan keresahan sosial pada isu tertentu. Pada penelitian ini tahap *emergence* yang terjadi adalah berkaitan dengan kekhawatiran jika sewaktu – waktu masyarakat diusir oleh PTPN XII Ngrangkah Pawon yang disisi lain masyarakat tidak mempunyai bukti legalitas kepemilikan tanah tempat tinggal mereka.

2. *Coalescence* (tahap penggabungan)

Setelah adanya keresahan sosial di tahap kemunculan, selanjutnya ditahap penggabungan gerakan sosial membentuk identitasnya sendiri, mereka melakukan pendefinisian gerakan yang sedang dilakukan. Pada tahap ini sudah mulai dipikirkan masalah strategi yang dipergunakan, peran ketua dalam penentuan taktik, serta adanya perekrutan anggota baru.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung, yang mana melakukan penyusunan strategi untuk menarik simpatisan masyarakat untuk bergabung dalam kelompok gerakan serta memperluas jaringan kepada organisasi dan badan pemerintah terkait untuk mendapatkan advokasi sehingga bisa membantu dalam pencapaian tujuan gerakan.

3. *Bureaucratization* (tahap birokrasi)

Tahap birokrasi adalah tahap yang melihat adanya pengaruh sifat – sifat birokrasi yang ada pada kelompok gerakan sosial yang mana sifat – sifat ini akan menjadikan gerakan sosial lebih kuat. Max Weber dalam (Suyudi, 2012) menjelaskan ada 10 poin ciri birokrasi, yang semuanya menjelaskan mengenai keorganisasian yang profesional, meliputi pembagian kerja yang jelas dan menjalankan *jobdesk* tertentu, diikat dengan sistem kontrak, adanya jenjang karir, dll

Dalam penelitian ini, Serikat Tani Tunggul Wulung sudah melakukan beberapa poin yang menunjukkan ciri birokrasi pada keorganisasiannya, namun belum maksimal, dan ada beberapa hal yang tidak ada. Alasan dari tidak semua ciri – ciri birokrasi ada pada gerakan Serikat Tani Tunggul Wulung salah satunya karena pengurus organisasi ini terbentuk secara sukarela dan kekeluargaan.

4. *Decline* (tahap kemunduran/penurunan)

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu gerakan mengalami kemunduran/penurunan yakni ketika tujuan gerakan sudah tercapai, gerakan sosial yang mengalami kegagalan karena permasalahan internal keorganisasiannya maupun masalah pada pemimpin gerakan, adanya tekanan dari pihak eksternal yang akhirnya mematikan proses gerakan yang dilakukan, maupun adanya perubahan dalam struktur yang

mengakibatkan tidak adanya lagi tantangan atas apa yang dilakukan oleh gerakan.

Gerakan sosial pada penelitian ini masih melakukan proses gerakan, didalam proses ada beberapa hal yang membuat gerakan berada pada fase penurunan yang salah satunya adalah ketidakjelasan mekanisme yang harus ditempuh karena terkesan dilempar – lempar oleh badan pemerintah terkait sehingga tidak ada titik terang pasti dalam pelaksanaan advokasi.

Membahas mengenai pengertian gerakan sosial, tentu beberapa tokoh punya pandangannya mengenai hal ini, tentu saja pandangan tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial yang saat itu terjadi. Dalam kaitannya dengan gerakan sosial ada dua katageori yang membedakan gerakan sosial, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Ada perubahan yang kurang lebihnya dipengaruhi oleh waktu dan keadaan pada saat itu.

Gerakan sosial diklasifikasikan menjadi dua, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Ada beberapa ciri yang membedakan klasifikasi tersebut, peneliti mencoba menjelaskannya dengan memakai pendapat dari Picharho dan Singh dalam (Suharko, 2006). Gerakan sosial lama menekankan pada materi dan perjuangan kelas, bagaimana buruh yang tertindas secara materi melakukan sesuatu untuk memperjuangkan haknya yang diwadahi dalam sebuah model kepartaian maupun kelompok serikat buruh. Sedangkan pada gerakan sosial baru lebih luas dan mendalam, tidak hanya berbicara mengenai materi, namun nilai menjadi dasar gerakannya. Dalam keanggotannya pun lebih luas tidak hanya dari segmen kelas tertentu saja, contohnya ketika membahas mengenai gerakan lingkungan orang yang ikut mempunyai latar belakang personal yang sangat beragam dalam kelas yang bervariasi, baik kelas politisi, guru, pemuka agama, maupun buruh pabrik, tidak ada batasan segmen kelas.

Definisi gerakan sosial baru salah satunya dijelaskan oleh Snow (Hidayat,

2012) , yakni :

“....social movement can be thought of as collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of institutional or organization channels for the purpose of challenging or defending extant authority, whether it institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture, or world order of which they are apart.”

Bukan lagi negara yang menjadi target sasaran satu satunya dari sebuah gerakan.

Pandangan lebih luas dalam otoritas tuntutan nya pun bisa dalam ranah institusional maupun kultural, dengan gerakan kolektif yang terorganisasi. Bisa mengenai gerakan karna menuntut keadilan HAM, korupsi di dalam instansi maupun hal - hal diluar negara, yang berkaitan dengan kultural seperti sistem kepercayaan.

Gerakan sosial erat kaitannya dengan tujuan yang menjadi dasar dari gerakan tersebut, ada sesuatu yang ingin diraih. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu setiap gerakan yang dilakukan suatu kelompok mempunyai strategi, hal ini untuk menentukan langkah – langkah yang efektif demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kemunculan gerakan sosial bukan terjadi secara tiba-tiba namun melalui proses dan strategi yang matang dalam menjalankan gerakan tersebut. Mc Adam dkk (dalam (Hakim, 2018) menjelaskan :

“...the same three board sets of factors in analyzing the emergence and development of social movements. these three factors are: Firtsly. the structure of political opportunities and constraints confronting the movement. Secondly, the formas of organization (informal as well as formal),available to insurgents. Thirdly, the collective processes of interpretation, attribution and social construction that mediate between opportunity and action”

Ada tiga faktor yang membuat gerakan sosial muncul dan berkembang yakni kesempatan politik, *framing*, dan mobilisasi sumberdaya. Tiga hal tersebut mempunyai peran dalam membantu mencapai tujuan suatu gerakan yang sedang

dilakukan, baik berupa eksistensi maupun tujuan sesungguhnya dengan adanya gerakan tersebut.

1. Struktur Kesempatan Politik

Menurut Mc Adam Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep *political opportunity structure* atau struktur kesempatan politik (Irawati, 2012). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kondisi politik tertentu baik di dalam kelompok internal gerakan maupun pengaruh politik diluar lingkungan tersebut, baik instansi maupun negara mampu mempengaruhi sebuah gerakan. Pengaruhnya bisa membuat struktur kesempatan politik menjadi ruang multidimensi yang gerakan dan tindakannya bisa menjadi dimudahkan (*facilitated*) atau bisa saja menjadi direpresi sehingga tidak berkembang (*repressed*) (Oliver dalam (Hidayat, 2012)

Gerakan sosial bukan serta merta tentang hal – hal yang berkaitan dengan tuntutan dan kemenangan, karna banyak gerakan sosial pun yang tidak bertahan lama di dalam sistem sosial. Menjadi hal yang penting dimana gerakan sosial harus bisa beradaptasi dengan perubahan sosial maupun sistem politik yang berlaku. Ini menjadi peluang untuk bisa mewujudkan tujuan dari gerakan sosial yang sedang dilakukan sebuah kelompok, atas dasar kepentingan yang sedang dilakukan.

Oleh karenanya terdapat empat dimensi dari *political opportunity* yang memiliki hubungan langsung dengan sistem sosial dimana gerakan eksis Locher, McAdam dkk (Sukmana, 2016) yakni:

- 1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik (*the relative openness or closure of the institutionalized political system*);
- 2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai hubungan antar kelompok yang berkuasa (*the stability or instability of that broad set of elite alignments that typically undergird a polity*);

- 3) Ada atau tidaknya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elite) dalam masyarakat (*the presence or absence of elite allies*); dan
- 4) Kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan refresif (*the state's capacity and propensity for repression*).

Dari keempat dimensi tersebut dapat dipahami bahwa dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu ketertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial Mc Adam dalam (Sukmana, 2016).

Jika dikaitkan di Indonesia, ada beberapa era yang sangat mempengaruhi gerakan sosial dari adanya kesempatan politik. Pada era orde baru yang notabennya sistem politik yang tertutup dengan kepemimpinan yang otoriter membuat masyarakat terbatas dalam penyampaian pendapat apalagi membentuk suatu perserikatan. Berbeda dengan munculnya era reformasi, yang mana sudah mulai mempertimbangkan hak azasi manusia, dengan kepemimpinan yang menyuguhkan sisi demokratis, sehingga masyarakat lebih merasa aman dalam menyampaikan pendapat atau pun kritikan bentuk dari penamatan terhadap jalannya kebijakan pemerintahan.

Pada saat ini pun forum - forum di media sosial, maupun selevel televisi nasional tidak segan lagi memberikan ruang diskusi publik, yang tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat dan menimbulkan konflik. Namun yang bisa dirasakan adalah hak penyampaian pendapat mulai diperhatikan, walaupun juga pada kenyataannya ada undang – undang yang membatasi kita dalam penyampaian pendapat.

2. Proses Pembingkaihan (*Framing*)

Framing menurut Mc Adam merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh kelompok gerakan sosial untuk melakukan pemberian makna tentang memahami dunianya sendiri yang dilegitimasi dan dimotivasi untuk memberikan

tindakan kolektif dalam kelompok tersebut maupun diluar lingkungan kelompok (Sukmana, 2016). Sehingga dengan adanya *framing* akan membuat internal

kelompok semakin kuat karena adanya pandangan yang diyakinin secara bersama, adanya *framing* juga bisa menarik orang lain untuk memberikan dukungannya karena adanya kesamaan pandangan dengan *framing* yang dibentuk. Hal tersebut dijelaskan oleh Benford dan Snow (Hidayat, 2012) yakni kerangka (*frame*) dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian atau kondisi tertentu, yang dimaksudkan untuk memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak.

Proses pembentukan *framing* yang dilakukan di dalam gerakan sosial sebenarnya ada beberapa tujuan, baik secara internal maupun eksternal yang tak lain untuk membantu menjcapai tujuan dari gerakan soaial tersebut. Menurut Gamson dan Mayer (Irawati, 2012), proses pembingkaian dilakukan untuk (1) memperkuat kesadaran kolektif, keputusan-keputusan strategis sebagai bagian dari gerakan, (2) mempertegas dan memperkuat subjek kontestasi antara aktor gerakan selaku representasi gerakan dengan negara dan para kelompok-kelompok yang berlawanan. Aktor-aktor yang berbeda baik di dalam maupun diluar gerakan, dalam konteks beragamnya kelompok sasaran, adalah faktor melebarnya *framing*. Agen-agen gerakan berupaya membawa isu mereka ke dalam kelompok sasaran yang beragam seperti media, partai politik, pejabat parlemen dan pemerintah.

Framing akan membentuk dua kubu, kubu dianggap benar dan kubu dianggap salah. Namun ini tidak menjadi dasar yang pasti karena masing – masing tetap akan menganggap pada posisi benar. Dalam posisi kelompok yang sedang melakukan gerakan sosial, tentu yang dilakukan adalah sesuatu yang benar dan melakukan tuntutan kepada lawan kubunya adalah sesuatu yang sah dan memang pantasny dilakukan. Di lain sisi, kubu yang lain pun akan tetap merasa berada pada posisi benar dan kubu yang melalukan tuntutan adalah tindakan yang salah.

Framing akan menyeleksi seseorang masuk kedalam segmen apa dengan segala pertimbangannya. *Framing* sangat kental terasa pada media massa. Hal ini tidak terlepas dari subjektivitas media itu dalam mengarahkan wacana yang sedang dibangunnya. Dalam gerakan sosial *framing* mampu mengarahkan orang untuk berpikiran sama dengan konsep yang dijelaskan. Siapa pihak yang dirugikan, siapa yang membuat penindasan, dll. Itu semua adalah peran dalam *framing* agar terciptakan simpati yang akhirnya menjadi bagian dari gerakan tersebut.

3. Mobilisasi Sumberdaya

Fokus dari mobilisasi sumberdaya sendiri adalah melihat proses – proses dari beberapa elemen yang diperlukan pada suatu gerakan yang kemudian elemen – elemen tersebut dimobilisasi untuk digunakan pada suatu gerakan. Fungsi dari mobilisasi sumberdaya ini untuk menunjang proses berjalannya suatu gerakan. Della Porta dan Diani (Dimpos, 2009) menyatakan bahwa gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara yang rasional, mengikuti segala kepentingan mereka, dan adanya peran kader dan pemimpin ‘profesional’ untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang ada pada mereka. Kekuatan gerakannya tergantung pada tersedianya sumber daya, baik sumber daya material (seperti usaha, uang, keuntungan konkret, dan jasa) maupun sumber daya nonmaterial (seperti otoritas, pertalian moral, kepercayaan, dan persahabatan) di dalam organisasi tersebut.

Terdapat dua model analisis dari pendekatan Resource Mobilization Theory yang pertama adalah *The Political – interactive model (The Political process models)* yang lebih melihat pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, jaringan, dan kaitannya dengan kelompok – kelompok tertindas. Selanjutnya pendekatan yang kedua adalah *The Organization –*

entrepreneurial models (The Prosional organizer models) yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald (Sukmana 2016, 158) yang memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan, dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan.

Tiga kunci yang penting menurut McCarthy dan Zald dalam mendukung keberhasilan sebuah gerakan antara lain adalah :

1. Organisasi

Menurut Mc.Carthy dan Zald (Sukmana 2016, 160) organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan – tujuan tersebut.

Pengorganisasian dalam gerakan akan membuat afektif dan efisien dalam melakukan suatu gerakan sosial, karena sudah adanya pembagian kerja sesuai dengan posisi dan kedudukan masing – masing anggota, mekanisme kerja yang lebih tertata sesuai dengan tahapan yang ingin dicapai, serta dengan adanya organisasi ini akan mempermudah jaringan dengan organisasi maupun kelompok lain yang dapat membantu memperkuat proses gerakan

2. Kepemimpinan

Seorang pemimpin dalam suatu organisasi gerakan sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal – hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil (Sukmana 2016, 159)

Pemimpin mempunyai peranan yang penting dalam memobilisasi suatu gerakan, karena seorang pemimpinlah yang mengatur strategi dan taktik dalam melakukan gerakan, dan dengan adanya pemimpin pula akan mempengaruhi arah

gerakan, karena ideologi yang kuat biasanya ada pada seorang pemimpin gerakan, sama halnya pada Serikat Tani Tunggul Wulung, ketua kelompok tersebut mempunyai peranan penting dan dominan, karena sejak awal terbentuknya kelompok tersebut, aktor inilah yang menjadi inisiator dengan cara mengumpulkan beberapa masyarakat yang menurutnya satu visi dengannya. Pada proses gerakan pun, ketua kelompok ini juga berperan aktif melakukan kerjasama maupun diskusi dengan organisasi dan badan pemerintahan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi gerakan tersebut.

3. Pengelolaan Sumberdaya

Di dalam gerakan sosial ada beberapa tipe sumberdaya, antara lain : sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi-sosial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya material. Ketika elemen sumberdaya tersebut dikelola dengan baik, maka signifikansi keberhasilan gerakan pun menjadi lebih besar. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber - sumber material, seperti pekerjaan, penghasilan, dan tabungan. Serta sumber - sumber non-material seperti wewenang, komitmen moral, kepercayaan, persahabatan, dll.

Dalam penelitian ini pengelolaan sumberdaya baik material dan non-material di dalam Serikat Tani Tunggul Wulung, berupa sumbangan sukarela dari ketua kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung untuk biaya akomodasi maupun transportasi kepada organisasi maupun badan pemerintah yang terkait dengan gerakan tersebut serta sumbangan sukarela dari pengurus kelompok untuk pembiayaan operasional kantor Serikat Tani Tunggul Wulung, berupa plang nama organisasi, serta pembukuan yang lain. Dalam penelitian ini lebih terlihat dominasi dari sumber non-material, karena terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat Desa Sepawon yang berada pada tingkatan menengah ke bawah, namun juga keadaan masyarakat yang masih guyub, ini terlihat dari kepercayaan

masyarakat kepada elite lokal disana, yang dalam hal ini adalah ketua kelompok gerakan serta komitmen bersama untuk tetap berjuang dan melanjutkan proses

pengajuan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, ini terlihat dari lamanya proses pengajuan yang belum menemukan titik terang, karena masih belum keluarnya izin pengukuran dari pihak PTPN XII.

Dalam penelitian ini gerakan sosial yang terbentuk adalah gerakan pengajuan sertifikat tanah masyarakat Desa Sepawon, khususnya pada masyarakat di dusun – dusun yang belum mendapatkan sertifikat tanah yang berada di areal PTPN XII.

Gerakan ini mempunyai tujuan pasti yakni mendapatkan legalitas tanah yang selama ini mereka tempati.

Namun disisi lain adanya gerakan ini juga ingin memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat Desa Sepawon atas pentingnya mempunyai legalitas tanah, yang selama ini masyarakat merasa aman dan damai menempati tempat tinggal mereka, pentingnya aktif terhadap program kebijakan pemerintah, dan bertindak sesuai aturan hukum yang baik, tanpa melakukan hal kekerasan terhadap pihak lawan yang dalam hal ini adalah PTPN XII.

Jika dilihat dari organisasional pun Serikat Tani Tunggul Wulung melakukan pembagian tugas terhadap pengurusnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka terima dalam kelompok tersebut. Ini memperlihatkan bahwa secara mekanisme organisasi sudah diterapkan oleh masyarakat desa, walaupun secara pendekatan masih menggunakan cara pendekatan secara tradisional, namun mereka tetap menggunakan pengorganisasian kelompok untuk melakukan efisiensi kerja.

2.3 Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual adalah konsep – konsep yang ada pada penelitian ini

yang saling menunjang satu sama lain dan menjelaskan pada analisis penelitian.

Dalam penelitian ini tinjauan konseptual sebagai berikut :

2.3.1 Lembaga Swadaya Masyarakat

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam gerakan yang dilakukan

Serikat Tani Tunggul Wulung adalah sangat penting, hal ini karena LSM Ratu

Adil yang membantu terbentuknya Serikat Tani Tunggul Wulung serta membantu

membuka jaringan kepada beberapa organisasi agraria maupun badan pemerintah

yang terkait dengan tanah. Dari alasan itulah yang membuat peneliti memasukkan

konsep Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penelitian ini, karena campur

tangan LSM untuk membangun gerakan Serikat Tani Tunggul Wulung sangat

besar.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (LKPP,

2018) Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Kemasyarakatan

merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan mengedepankan

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dengan tujuan

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Sedangkan menurut Hollawey dalam (Ari Ganjar Herdiansah, 2016) konsen

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah bentuk organisasi yang memperhatikan

kepentingan masyarakat yang secara mandiri dan bukan untuk mencari

keuntungan atau bisa disebut organisasi yang memberikan manfaat kepada

masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat bukan hanya sebatas wadah untuk

menaungi kepentingan masyarakat, namun juga sebagai pelindung masyarakat

berkaitan dengan penegakan hukum. Menurut Mauzelis dalam (Halili, 2006) LSM

turut menciptakan penegakan hukum yang efektif untuk kepentingan masyarakat

dari kewenangan – kewenangan pemerintah. Adanya pengelolaan yang efektif pada kelompok – kelompok sipil yang ada misal pada LSM akan menciptakan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan pada pemegang kekuasaan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi masyarakat.

Menurut Andra L. Corrothers dan estie W. Suryatna dalam (Gafar, 2006) diidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM dalam sebuah Negara yaitu; pertama: katalisasi perubahan sistem, yakni dengan melakukan identifikasi sebuah masalah yang penting yang ada di dalam masyarakat lalu memberikan advokasi perubahan ke negara. Kedua: Memonitoring kebijakan dan penyelenggaraan yang dilakukan negara untuk meminimalkan adanya penyimpangan kekuasaan yang akhirnya merugikan masyarakat. Ketiga: Memberikan pendampingan kepada para korban serta melakukan pembelaan. Keempat: Pelayanan yang dilakukan oleh LSM berupa pelaksanaan sebuah program untuk masyarakat.

Berikut merupakan dampak dari positif dari keberadaan NGO (Muktiali, 2013)

a. Dampak Sosial

Melalui pengetahuan (*knowledge*) yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Dalam hal ini akan memberikan pandangan yang lebih terbuka, baik melekat informasi dan pengetahuan yang ada disekitar, membuat masyarakat berkembang secara personal.

b. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, masyarakat akan diberikan cara pengelolaan keuangan yang baik yang akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai modal, mengingat begitu

pentingnya modal untuk pengembangan usaha sebagai upaya peningkatan taraf hidup.

c. Dampak Kemasyarakatan

Adanya perhimpunan yang ada di masyarakat akan memperkuat proses komunikasi dan pertukaran wawasan, hal ini menjadi hal yang positif untuk masyarakat lebih aktif dalam proses pembangunan baik dalam cakupan negara atau lingkungan sekitarnya.

Sesuai dengan fungsi LSM dalam UU No. 8 Tahun 1985 maka secara garis besar ada 2 (dua) pola dan pendekatan yang dapat dilakukan LSM dalam merealisasikan visi dan misinya yakni:

1. Advokasi

Pola ini biasanya dilakukan oleh LSM untuk memfokuskan kegiatannya pada perubahan kebijakan pemerintah. LSM bidang advokasi lebih banyak memilih memanfaatkan pendekatan hukum dan politik. Misalnya LSM memantau transparansi penggunaan APBD dan Penegakan Hukum dan;

2. Intervensi

LSM intervensi lebih banyak memfokuskan dalam kegiatan praktis. Misalnya LSM yang bergerak dalam hal pengembangan ekonomi, teknologi tepat guna dan sebagainya. Pola intervensi ini berkaitan langsung dengan program yang sedang diurus oleh LSM yang tepat guna kepada masyarakat

Dalam penelitian ini peran LSM sangat besar dalam melakukan pendampingan dan penyusunan strategi. LSM yang mendampingi adalah LSM Ratu Adil dari Blitar, yang diwakilkan oleh Bu Haryanti yang merupakan warga Kediri. Pemilihan LSM ini untuk menjadi pendamping tidak lain karena LSM serupa pernah mendampingi gerakan penuntutan tanah yang lokasinya tidak jauh dari Desa Sepawon, yakni Desa Sempu.

2.3.2 Sengketa Tanah

Sengketa agraria menurut UU No 86 tahun 2018 pasal 1 ayat 9 adalah

perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah ada beberapa jenis, salah satunya sengketa melihat unsur yang terlibat ada dua jenis, hal ini menurut unsur yang terlibat dalam persengketaan tersebut. Pertama sengketa agraria yang bersifat vertikal, yakni sengketa agraria yang disebabkan oleh kebijakan negara terhadap pemanfaatan tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya. Kedua sengketa agraria yang bersifat horizontal, yakni sengketa agraria yang melibatkan dua individu atau lebih terkait dengan kepemilikan hak atas tanah (Riza, 2010). Dalam penelitian ini membahas mengenai sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan BUMN.

Berbicara mengenai konflik tanah antara warga sipil dengan negara bukanlah menjadi tajuk permasalahan baru di Indonesia. Kasus – kasus tersebut bermunculan yang mempunyai benang merah yang sejenis, yakni adanya klaim tanah dari masyarakat yang berbenturan dengan klaim dari swasta maupun negara. Pengupayaan akan mendapatkan hak tempat tinggal maupun tanah garapan yang akhirnya melahirkan gerakan sosial di akar rumput. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak terjadi konflik agraria. Peneliti berusaha memperlihatkan kuantitas konflik yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1 - Konflik Agraria di Indonesia

Tahun Konflik Agraria	Jumlah Konflik Agraria	Jumlah konflik agraria sektor perkebunan	Persentase jumlah konflik agraria sektor perkebunan (%)
2016	450	163	36,22
2017	659	208	32
2018	410	144	35
2019	279	87	31
2020	241	122	51

(Sumber : Data Konsorsium Perbaruan Agraria, diolah peneliti)

Dari data konflik agraria, jumlah kasus konflik agraria selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memperlihatkan penurunan. Tentu ini menjadi kabar baik untuk masyarakat dan tentunya pemerintah karena program yang dijalankan pemerintah baik reforma agraria maupun PRONA memberikan dampak positif. Namun dampak positif penurunan jumlah kasus konflik agraria tidak begitu dirasakan di sektor perkebunan, ini terlihat dari kuantitas kasus yang masih tinggi dan sektor perkebunan masih menjadi peringkat pertama daripada sektor lain, bahkan di tahun 2020 ada 51% kasus konflik agraria dari sektor perkebunan. Hal ini harusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang mengenai mekanisme penanganan konflik agraria khususnya pada sektor perkebunan.

Konflik agraria di sektor perkebunan juga menjadi kasus dalam penelitian ini, yakni PTPN XII Ngrangkah Pawon. Dalam data konsorsium Pembaruan Agraria mengenai konflik agraria di dalam HGU BUMN/negara pada tahun 2019, terdapat dua kasus yang terjadi sengketa tanah dalam HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon, yakni di Desa Satak dan Sepawon yang masing – masing bersengketa mengenai tanah HGU yang menurut warga adalah hak masyarakat karena melihat sejarah tanah tersebut. Namun disisi lain klaim areal tersebut masuk ke dalam HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Lokasi				Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
Kediri	Puncu	Satak	Satak	Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)	477	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui Permenkeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi tanah melalui Perpres No.06/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
Kediri	Plosoklaten	Sepawon	Ngrangkah dan Badek	Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)	702	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui Permenkeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi tanah melalui Perpres No.06/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII

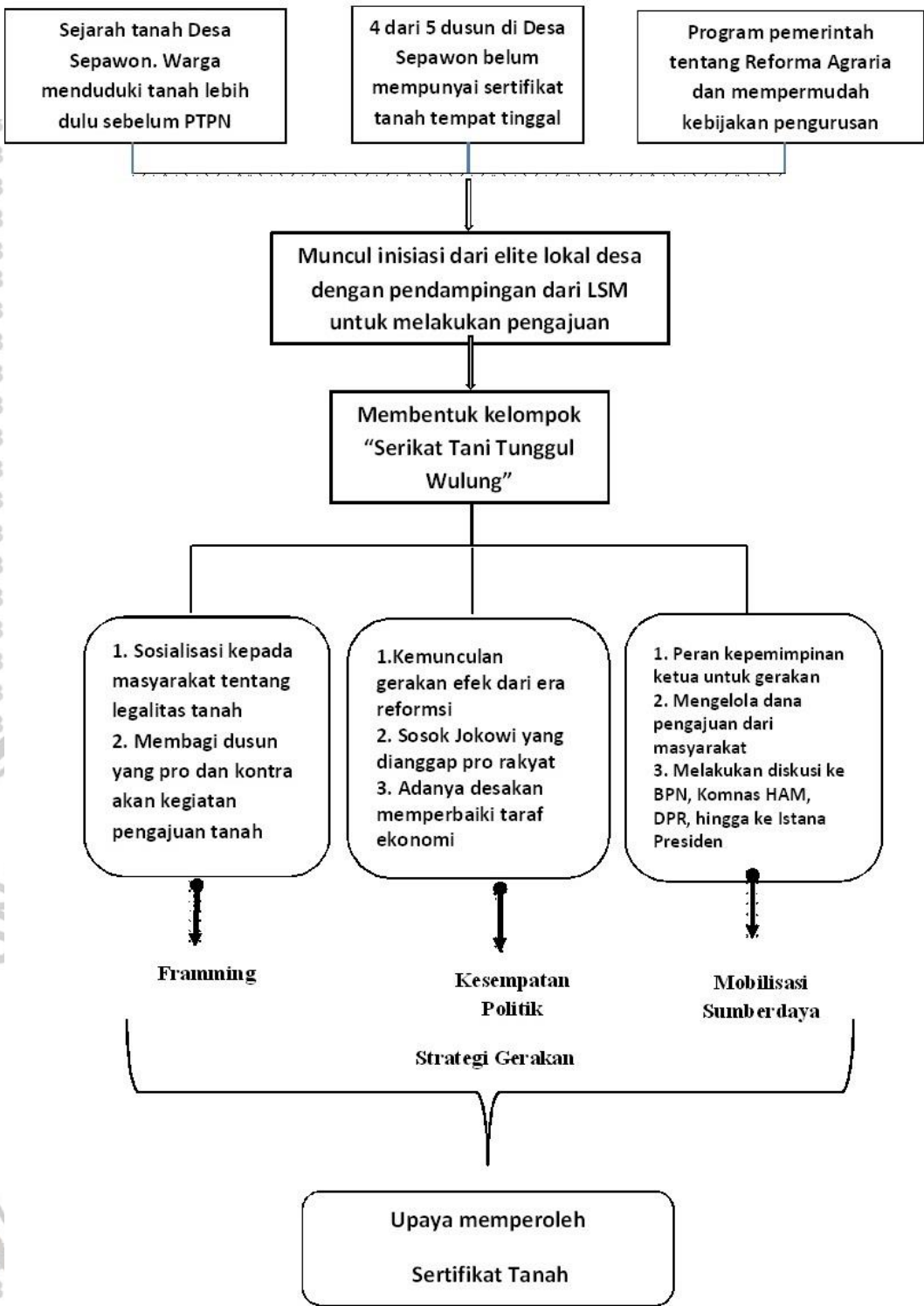
Gambar 1 - Kasus Konflik Agraria HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon
(Sumber : Data Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2019)

Sama dengan yang terjadi di Sepawon, bahkan warga Satak terlebih dahulu melakukan gerakan. Hal yang menjadi pembeda adalah eksekusi dari pola gerakan yang dipilih. Masyarakat Desa Satak lebih memilih aksi turun ke jalan dan tidak takut melakukan aksi anarkis. Sedangkan Serikat Tani Tunggul Wulung memilih melakukan pendekatan dalam ranah advokasi, berupa politik hukum.

Sengketa tanah yang terjadi baik masyarakat Sepawon dan masyarakat Satak dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon yang mempermasalahkan legalitas tempat tinggal warga yang berbenturan dengan HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon, tidak terlepas dari sejarah tanah yang ada pada desa tersebut. Masyarakat merasa mempunyai hak karna lebih dahulu menempati tanah tersebut apalagi dengan adanya dasar di dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Np. 24 1887 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana berisi batas waktu yaang bisa membuat orang secara legal mendaftarkan status tanah yang ditempatinya, jika sudah menempati tempat tersebut dalam kurun waktu 20 tahun. Atas dasar itulah masyarakat memeberanikan diri untuk melakukan pengajuan dan penunttan hak karena merasa dalam posisi benar secara hukum menurut pandangan masyarakat.

Dalam kasus yang serupa, banyak masyarakat sipil menggunakan pertaran tersebut sebagai dasar untuk melakukan gerakan. Dalam kasus yang mengkaitkan PTPN XII Ngrangkah Pawon sendiri ada dua kasus di dua desa yang menggunakan dasar asumsi tersebut, yakni kasus di Desa Sepawon dan Desa Sempu. Masyarakat merasa mempunyai hak karena terlebih dahulu menempati tanah tersebut yang kemudian ditinggali secara turun temurun, kemudian merasa hak nya direbut oleh negara karena adanya kebijakan nasionalisasi aset yang berujung kepemilikan tanah tersebut adalah milik negara dan dikelola sepenuhnya oleh negara.

2.4 Alur Berpikir



Keterangan



: Masalah penelitian



: penghubung realitas&teori



: analisis teori dan realitas



: penghubung tiga konsep penting&realitas



: hubungan antar realitas

Bagan 1 - Alur Berpikir
(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Bermula dari kekhawatiran terjadi penggusuran oleh PTPN XII dikemudian

hari, terhadap tempat tinggal yang selama ini ditempati oleh masyarakat Desa

Sepawon, khususnya 4 dari 5 dusun yang belum mempunyai sertifikat yakni Dusun Ngrangkah, Sepawon, Badek dan Gathok serta adanya program dari pemerintah tentang 'Reforma Agraria' yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat tanah. Kemudian beberapa warga yang diinisiasi oleh elite lokal desa dengan dibantu oleh LSM, membentuk suatu kelompok, yakni Serikat Tani Tunggul Wulung, yakni sebuah wadah untuk masyarakat Desa Sepawon yang ingin mengajukan sertifikat tanah.

Dalam melakukan proses pelaksanaannya, Serikat Tani Tunggul Wulung melakukan pengorganisasian kelompok, baik berupa pembentukan kepengurusan, melakukan diskusi dengan BPN, DPRD Jawa Timur Komisi II, Komnas HAM, dan KSP mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapai serta melakukan pendekatan politik terhadap koneksi ke dalam istana negara, dengan bergabung dalam kelompok JPKP badan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk menampung permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat, agar bisa ditindaklanjuti. Permasalahan yang dibawa oleh Serikat Tani Tunggul Wulung tersebut mengenai terganjalnya ijin pengukuran tanah dari PTPN XII, karena menganggap tanah yang sedang diperjuangkan warga untuk mendapatkan sertifikat tanah merupakan aset dari PTPN XII.

Secara internal kelompok, Serikat Tani Tunggul Wulung memilih ketua dari elite lokal dusun, karena dianggap mampu memimpin warga, karena pengalamannya pernah menjadi kepala kampung di daerah tersebut. Dalam hal ini juga ketua serikat mempunyai dominasi yang cukup tinggi, karena ia yang menyusun strategi yang harus dilakukan oleh serikat, baik berupa kerjasama dengan pihak luar maupun negosiasi dengan badan pemerintah yang terkait.

Dalam hal mengenai kepengurusan, para anggota pengurus mempunyai hubungan baik satu sama lain, karena sebelum tercetusnya kelompok tersebut, para anggota pengurus merupakan teman dekat, atau mereka menyebutnya “*konco ngopi*” dari aktifitas tersebut jugalah yang membuat mereka sepakat membentuk kelompok. Dengan adanya latar belakang ketua kelompok yang merupakan mantan kepala kampung dan ada beberapa anggota kepengurusan yang menjadi pengurus dusun, hal tersebut membuat pendekatan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan hal ini mempengaruhi minat masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah.

Peneliti melihat adanya kesesuaian mengenai realita dilapangan baik mengenai pengorganisasian Serikat Tani Tunggul Wulung maupun faktor penggerak yang ada dalam kelompok yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung dengan teori gerakan sosial dari Mc Adam, Mc Carthy and Zald dengan kombinasi tiga poin penting yakni kesempatan politik, *framing* (pembingkai), dan mobilisasi sumberdaya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Ahmadi, 2016) metode

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif : baik

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dihasilkan dari pola pengamatan

terhadap obyek tersebut secara langsung. Pemilihan pendekatan kualitatif

deskriptif dipilih karena mampu memberikan penjelasan mengenai perilaku

individu yang secara kesaharian dilakukan, dalam kasus ini berkenaan dengan

cara para pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung yang melakukan pendekatan

dan penggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah di

Dusun Badek dan Gathok di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten

Kediri maupun respon dari masyarakat, LSM, maupun pihak desa mengenai

keberadaan Serikat Tani Tunggul Wulung.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yakni menurut Mardalis

(2007) bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Sehingga

penggunaan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi sosial

yang dalam hal ini adalah strategi Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan

perjuangan pengajuan sertifikasi tanah, secara lebih mendalam dan rinci.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti gunakan sebagai tempat mendapatkan

informasi dan data yakni di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten

Kediri, khususnya di dua dusun yakni Badek dan Gatok. Pemilihan lokasi ini

didasarkan karena 4 dari 5 dusun di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten,

Kabupaten Kediri belum memiliki sertifikat tanah, untuk alasan tersebut masih

menjadi perdebatan karena menurut masyarakat bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah diluar kepemilikan PTPN XII, namun dari pihak PTPN XII meyakini bahwa tanah yang ditempati masyarakat adalah pilik perkebunan.

Alasan kedua adalah karena perbedaan pandangan yang terjadi antara masyarakat dan PTPN XII itulah yang melatarbelakangi terbentuknya kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung yang bertempat di salah satu dusun yang belum mempunyai sertifikat (Dusun Badek), sedangkan alasan terakhir mengenai pemilihan lokasi tersebut karena proses penggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengajuan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dilakukan di Dusun Badek dan Dusun Gatok.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat strategi Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan perjuangan pengajuan sertifikasi tanah di areal PTPN XII, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Meliputi peran dari para aktor penggerak yang melakukan pemenejeman di dalam kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung, pendekatan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam hal kepemimpinan, hubungan kerja sama yang dibuat oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dengan pihak desa, LSM, maupun badan pemerintah untuk membantu pencapaian tujuan dari Serikat Tani Tunggul Wulung serta melakukan pendekatan dan mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan tindakan kolektif, yakni pengajuan sertifikat tanah.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Satori dan Komariah (2013) teknik *purposive* menentukan subyek atau obyek sesuai tujuan, dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhan dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. Dalam penelitian ini pemilihan informan didasarkan pada

pertimbangan yang sesuai dengan topik penelitian, jadi informan dalam penelitian

ini adalah kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung, yang mana kelompok ini

mengetahui dan mempunyai informasi mengenai strategi untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam pengajuan sertifikat yang telah kelompok tersebut

koordinir, serta masyarakat Desa Sepawon khususnya di dua dusun, yakni Dusun

Badek dan Gathok yang ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah, dimana

masyarakat ini mengetahui dan menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan

Serikat Tani Tunggul Wulung.

Selain itu peneliti juga memilih informan tambahan yaitu Pemerintah Desa

Sepawon, BPN, serta LSM yang mendampingi kelompok Serikat Tani Tunggul

Wulung. Tiga hal tersebut mengetahui program Serikat Tani Tunggul Wulung dan

secara teknis berhubungan dengan upaya yang diperjuangkan kelompok Serikat

Tani Tunggul Wulung untuk mendapatkan sertifikat tanah untuk tempat tinggal

yang selama berpuluh – puluh tahun sudah ditempati.

Kriteria dalam penentuan informan , sebagai berikut :

1. Mengetahui gerakan yang sedang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung.
2. Ikut terlibat aktif atau tidak aktif, maupun yang tidak berkenaan secara langsung dengan Serikat Tani Tunggul Wulung

Informan kunci :

1. Ketua dan anggota pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung
2. Masyarakat yang ikut serta dalam pengajuan sertifikasi tanah

Informan tambahan :

1. Pemerintah Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
2. Staf BPN Kabupaten Kediri
3. LSM yang mendampingi Serikat Tani Tunggul Wulung

3.5 Sumber Data

Jenis data iyang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer

sebagai data utama dan jenis data sekunder sebagai data pendukung. Sumber data

primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data primer

Misbahuddin dan Hasan (2013) data primer adalah data yang langsung diambil dilapangan oleh peneliti secara langsung sesuai dengan penbelitian yang sedang diangkat, sehingga memperoleh data asli. Sedangkan menurut Lofland dalam Meleong (2012) data yang dihasilkan dari data primer adalah berupa kata – kata yang diucapkan atau tindakan yang dilakukan informan. Data primer sangat erat kaitannya dengan proses interview narasumber yang dilakukan secara langsung, untuk mendapatkan jawaban secara langsung dan spontan dari narasumber. Data primer juga bisa berupa observasi langsung saat turun lapang untuk melihat kegiatan dari narasumber.

Dalam penelitian ini, data primer berupa wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat, Serikat Tani Tunggul Wulung, dan beberapa oarang yang mempunyai kaitannya dengan kassus tanah dan gerakan pengajuan sertifikat tanah yang di lakukan di Dusun Badek dan Gathok. Adapun untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam, handphone, dan kamera. Sedangkan bentuk data primer pada penelitian ini adalah berupa wawancara dan transkrip data dari hasil proses penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, baik dari penelitian yang sebelumnya, artikel, ataupun jurnal yang bertujuan menunjang data primer dan kasus penelitian yang diangkat. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel mengenai aktifitas gerakan Serikat Tani Tunggul Wulung yang sudah dipublikasi di dalam artikel online, Data dokumentasi maupun arsip dari Serikat Tani Tunggul Wulung

baik yang meliputi organisasi kelompok maupun berkaitan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dalam proses perjuangan pengajuan sertifikat tanah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi menurut Narbuko & Ahmadi (2007) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki. Teknik observasi dipilih, karena tahap ini merupakan tahap awal peneliti mengenal kehidupan sosial masyarakat yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini. Observasi juga akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan kegiatan kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung.

Dalam proses observasi pada penelitian ini yang dilakukan peneliti dengan melakukan *tracking* lokasi penelitian yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Melihat perkampungan di Dusun Badek dan Gathok dan membandingkan dengan perkampungan yang dimiliki PTPN XII Ngrangkah Pawon, masyarakat sering menyebutnya dengan istilah rumah *pakelan* yang dibangun khusus dari pabrik yang bisa ditempati oleh karyawan PTPN XII Ngrangkah Pawon. Melihat interaksi antar pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung dengan beberapa masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara mendalam menurut Burhan Bungin (2007) adalah proses memperoleh keterangan dan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara yang sebelumnya sudah disusun rapi, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara mendalam,

menurut Bandur (2014, hal. 94) wawancara mendalam sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah jenis wawancara secara personal. Pemilihan jenis wawancara personal dipilih peneliti agar bisa melakukan tanya jawab secara lebih mendalam dan juga tidak menutup kemungkinan akan memperoleh data yang lebih bervariasi antara satu informan dengan yang lain, karena teknik seperti ini meminimalisir provokasi dari orang luar yang mempengaruhi jawaban dari si informan.

Dalam proses wawancara, peneliti lebih memilih pertanyaan yang bersifat umum dan terbuka namun tetap mempertimbangkan dengan poin – poin data yang harus terjawab yang sudah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara.

Sehingga narasumber bisa bercerita sesuai yang dilakukan maupun yang disaraskan. Hal pertama yang peneliti lakukan adalah melakukan wawancara dengan pihak pemerintah Desa Sepawon mengenai adanya gerakan yang ada di dalam desa tersebut serta apa dukungan dari pihak desa. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung, mengumpulkan data berupa pengorganisasian maupun hal – hal internal gerakan serta proses gerakan yang sudah dilakukan maupun yang ingin dilakukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat untuk melakukan pembandingan maupun pandangan dari masyarakat dengan adanya gerakan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung. Kegiatan wawancara yang dilakukan di Desa Sepawon membutuhkan beberapa kali turun lapang, mengingat untuk melakukan wawancara kepada pengurus maupun masyarakat harus dilakukan pada malam hari karena pagi sampai sore masyarakat sibuk bekerja di ladang. Total keseluruhan wawancara di Desa Sepawon ada empat hari.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Kediri untuk melihat sejauh mana proses pengajuan sertifikat tanah yang

dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung berjalan dalam mekanisme resmi serta mempertanyakan status tanah Desa Sepawon yang dalam perkembangannya menjadi sengketa tanah antara pihak masyarakat dengan PTPN XII Ngarangkah Pawon. Untuk wawancara terakhir dilakukan dengan pihak pendamping, yakni LSM untuk mengorek informasi mengenai pola yang dibentuk di Serikat Tani Tunggul Wulung dan sejauh apa proses gerakan yang sudah dilakukan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan wawancara dengan pihak BPN dan LSM adalah dua hari, mengingat bahwa peneliti mengikuti jadwal yang sudah ditentukan narasumber.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah ada, yang kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi yang lebih terperinci dan terstruktur yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau sebuah karya dari seseorang. Dokumentasi merupakan bagian penunjang dari penelitian dan masuk dalam kriteria data sekunder. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, sketsa, maupun monumental.

Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa gambar kegiatan yang sudah dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung, arsip baik mengenai internal kelompok maupun yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung, dll.

Dalam proses dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan foto kondisi fisik lokasi penelitian serta penunjang lainnya. Dokumentasi berupa data maupun tulisan juga diperoleh peneliti, seperti dokumen BPN Kabupaten Kediri dan dari pendamping yakni pihak LSM, yakni berupa *resume* permasalahan tanah antara Serikat Tani Tunggul Wulung dengan PTPN XII Ngarangkah Pawon, maupun berkas surat yang diterima oleh pihak BPN Kabupaten Kediri.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Hubermas dan Saldana (2014) aktivitas dalam analisis

data kualitatif meliputi kondensai data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Kondensasi data

Pada tahap ini kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfilteran, penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data yang muncul dalam data yang diperoleh, dapat berupa hasil observasi, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data lebih kuat. Kondensasi data tidak melakukan pengurangan data yang sudah diperoleh, untuk mencegah kehilangan data yang masih dapat digunakan dalam proses analisis (Saldana, 2014). Proses kondensasi dilakukan secara bertahap dari hasil temuan lapang, baik wawancara maupun dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, data – data tersebut dikumpulkan dan dipilah dengan cara mengkatagorikan data, sehingga peneliti dapat dengan mudah menyusun data yang penting maupun data pendukung dari hasil pengkatagorian tersebut.

Proses kondensasi data peneliti mengumpulkan semua data, baik wawancara, dokumen, artikel media, dll. Kemudian dari data – data tersebut dibuat bagan dan catatan untuk mempermudah proses pengumpulan, yang mana dari data tersebut disusun untuk melihat perkembangan kasus penelitian.

Pengumpulan data ini nantinya akan membantu peneliti dalam melakukan pengembangan data dan pembahasan.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013) Proses penyajian data adalah proses setelah data

dipilah dan di klasifikasi, kemudian diberi topik tertentu. Topik – topik ini lah yang kemudian dimasukan kedalam tabel, data – data yang masuk kedalamnya

akan dijelaskan hubungannya berupa narasi. Sehingga narasi ini yang akan digunakan dalam proses analisi penelitian, hal ini juga mempermudah peneliti dalam mencari data yang akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat.

Proses kondensasi data pada penelitian ini dibuat dengan cara membuat tabel, yang kemudian dikelompokan berdasarkan tema yang sama.

Hal tersebut mempermudah peneliti untuk membaca data maupun mencari data karena sudah dikumpulkan dalam satu tabel. Peneliti membuat kata kunci yang menggambarkan isi dari data tersebut, yang menunjang gambaran umum maupun poin penting di dalam teori yang digunakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal atau yang biasa hipotesis terhadap suatu kasus, digunakan untuk melakukan pembandingan dengan data lapangan, sehingga sangat bersifat fleksibel dan bisa berubah sesuai perkembangan bukt – bukti di lapangan, yang kemudian akan dijadikan rujukan apakah penarikan kesimpulan awal sudah sesuai atau mengalami perbedaan, yang mana akan dibuat pada acuan tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena sepeti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2013)

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan peneliti adalah membentuk hipotesis awal mengenai kasus tanah di Sepawon, yang kemudian dalam proses turun lapang yang menemukan banyak data membuat perkembangan penelitian. Ini pun terjadi pada penelitian ini, awalnya peneliti hanya memakai teori mobilisasi sumberdaya saja, namun setelah pengumpulan data baik dokumen dan wawancara, akhirnya terjadi pengembangan bahwa akan lebih cocok menggunakan teori gerakan sosial dengan memakai perspektif komprehensif yang menggabungkan struktur kesempatan politik, *framing* (pembingkai), dan mobilisasi sumberdaya.

3.8 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Komariah (2013) merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga ada triangulasi dari sumber, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara mencari data dari berbagai sumber namun masih terikat satu sama lain, yang dalam hal ini adalah wawancara terhadap para informan, dari wawancara tersebut akan diperoleh beragam data, yang kemudian akan dibandingkan satu sama lain, dari proses tersebut akan diperoleh data dominan yang kemudian menjadi data valid dalam penelitian tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Tipologi Desa Sepawon



Gambar 2 - Gerbang Masuk Desa Sepawon
(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Desa Sepawon terletak di wilayah Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Letak Desa Sepawon berada disebelah utara Desa Satak, Kecamatan Puncu, sebelah selatan Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, sebelah timur hutan, dan sebelah barat Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten. Secara geografis Desa Sepawon dibagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Badek, Dusun Ngerangkah, Dusun Sepawon, Dusun Gathok, dan Dusun Petung Ombo. Desa Sepawon termasuk desa/kelurahan berada pada topografi lereng gunung, yakni Gunung Kelud dengan luas wilayah sebesar 157,00 Ha. Jumlah penduduk di Desa Sepawon sebesar 5.893 orang.

Desa Sepawon masuk kedalam areal PTPN XII Ngrangkah Pawon, yang merupakan perkebunan. Mengenai perkebunan di Desa Sepawon dibagi menjadi dua, yakni milik negara dan milik rakyat, hal ini dikarenakan adanya PTPN XII Ngrangkah Pawon yang berada mengelilingi Desa Sepawon. PTPN XII Ngrangkah Pawon sendiri merupakan perkebunan milik negara, yang komoditinya berupa kopi dan cokelat dengan luas perkebunan sebesar 120,00 Ha dengan hasil



perkebunan sebesar 10,00 (Kw/Ha) sedangkan luas perkebunan milik rakyat sebesar 0,20 Ha dengan hasil perkebunan sebesar 0,60 Kw/Ha.

Luas wilayah di Desa Sepawon, dibagi menjadi beberapa penggunaan tanah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan tanah tersebut meliputi lahan untuk bercocok tanam, pemukiman, fasilitas yang tersedia di desa, hingga luas tanah perkebunan milik negara. Dari total luas tanah 3.119,90 Hektar ada sekitar 2.967,00 Hektar atau sebesar 95% adalah luas perkebunan milik negara, hal ini dikarenakan letak perkebunan milik PTPN XII Ngrangkah Pawon masuk kedalam administratur Desa Sepawon, sedangkan pemukiman warga hanya sebesar 2,2% atau seluas 68 Hektar.

Tabel 2 - Tata Guna Tanah Desa Sepawon

Penggunaan	Luas Wilayah (Hektar)	Persentase (%)
Tegal/Ladang	12,00	0,4
Pemukiman	68,00	2,2
Pekarangan	6,00	0,3
Perkebunan negara	2.967,00	95,0
Perkebunan perorangan	19,00	0,6
Hutan	20,00	0,6
Fasilitas umum	27,90	0,9
Jumlah	3.119,90	100

(Sumber : Data Desa Sepawon)

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sepawon terbesar ada pada pendidikan SD dan SMP, yakni sebesar 47,5% dan 22,9%. Hal tersebut dipengaruhi dari program pemerintah mengenai program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan pada minat pendidikan di jenjang yang lain terlihat masih minim, bahkan minat untuk melanjutkan SMA sekalipun. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sepawon sehingga mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan antara lain adalah pandangan mengenai mencari pendapatan lebih utama dari pada pendidikan, faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan yang terakhir mengenai permasalahan akses dan masih minimnya sarana prasarana

pendidikan di Desa Sepawon. Gedung pendidikan yang ada pada Desa Sepawon hanya ada gedung TK dan SD, yakni dengan jumlah gedung TK 4 buah dan gedung SD 3 buah. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP dan SMA masyarakat harus menuju ke desa lain dan jaraknya relatif jauh. Faktor – faktor tersebut yang mempengaruhi minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni SMA maupun di perguruan tinggi.

Tabel 3 - Pendidikan Masyarakat Desa Sepawon

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	785	15,8
Tamat SD/ sederajat	2363	47,5
Tamat SMP/ sederajat	1140	22,9
Tamat SMA/ sederajat	627	12,6
Tamat D-2/ sederajat	16	0,3
Tamat S-1/ sederajat	45	0,9
Jumlah	4976	100

(Sumber : Data Desa Sepawon)

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sepawon adalah petani dengan presentase sebesar 15,7%, namun disisi lain kategori terbesar didominasi pekerjaan yang pasif yakni Ibu Rumah Tangga sebesar 31,5%. Dalam data juga memperlihatkan presentase mengenai masyarakat yang belum bekerja dan masih menjadi pelajar. Faktor yang mempengaruhi masyarakat banyak yang menjadi petani adalah iklim di Desa Sepawon yang cocok untuk bercocok tanam karena berada pada lereng gunung, komoditas pertanian, hasil terbesarnya adalah padi dan cabe. Presentase yang tinggi setelah petani adalah pekerjaan wiraswasta, pedagang keliling, dan pedagang kelontong, jenis pekerjaan yang memerlukan modal yang cukup besar.

Tabel 4 - Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sepawon

Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Petani	683	15,7
Pegawai Negeri Sipil	17	0,4
Pedagang barang kelontong	45	1,0

Peternak	96	2,2
Pedagang keliling	111	2,5
Wiraswasta	160	3,7
Pelajar	727	16,7
Ibu Rumah Tangga	1374	31,5
Pengrajin industri rumah tangga	13	0,3
Sopir	48	1,1
Belum bekerja	1083	24,9
Jumlah	4357	100

(Sumber : Data Desa Sepawon)

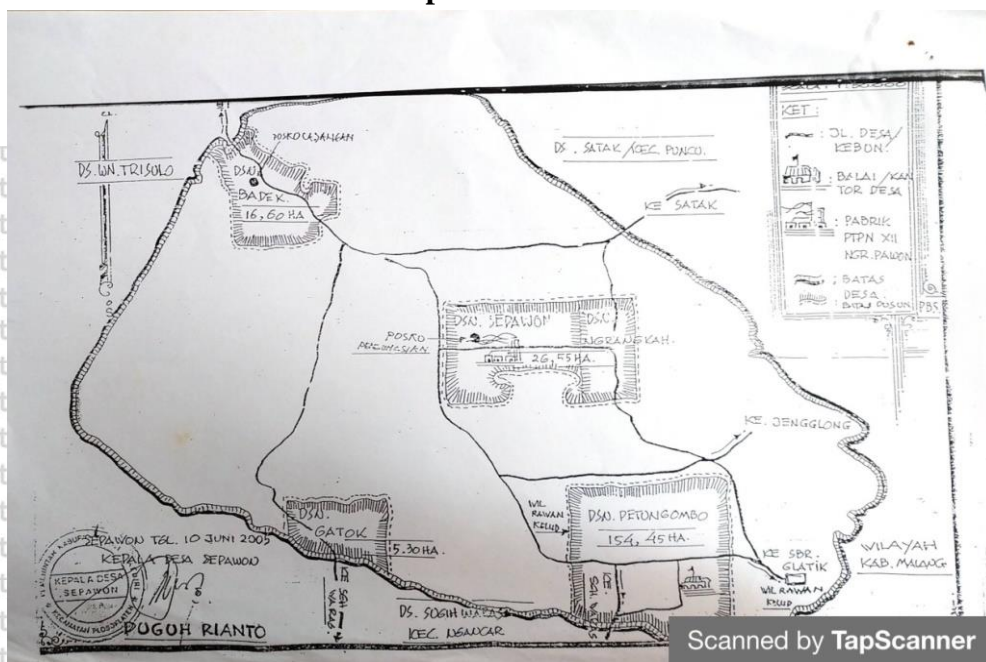
Ketertarikan untuk menaikkan taraf hidup perekonomian dengan membuka usaha juga menjadi alasan yang mempengaruhi minat masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam pengajuan sertifikat tanah yang dikoordinir Serikat Tani Tunggul Wulung. Dengan adanya sertifikat tanah membuat masyarakat bisa melakukan pinjaman modal untuk membuka usaha. Mengingat mengenai kesejahteraan masyarakat Desa Sepawon banyak yang berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah, ada sekitar 32% masyarakatnya masuk kedalam kategori prasejahtera. Keluarga prasejahtera merupakan kategori keluarga dengan kondisi belum bisa memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) secara minimal, contohnya pangan, sandang, papan, kesehatan (BKKBN, 1994).

Tabel 5 - Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepawon

Kategori	Jumlah (keluarga)	Persentase (%)
keluarga prasejahtera	598	32
Keluarga prasejahtera 1	655	36
Keluarga prasejahtera 2	397	22
Keluarga prasejahtera 3	142	8
Keluarga prasejahtera 3 plus	53	3
Jumlah	1845	100

(Sumber : Data Desa Sepawon)

4.2 Permasalahan Tanah Desa Sepawon



Gambar 3 - Peta Desa Sepawon

(Sumber : Dokumentasi Serikat Tani Tunggul Wulung)

Gambar peta diatas memperlihatkan bahwa lokasi Desa Sepawon berada pada kawasan pabrik PTPN XII Ngrangkah Pawon. Dalam penelitian kali ini gerakan yang terjadi ada pada Dusun Badek dan Gathok. Luas tanah di Dusun Badek sebesar 16,60 HA lokasinya tepat berada pada perbatasan desa sebelah barat dan dekat dengan gerbang masuk gapura PTPN XII Ngrangkah Pawon. Sedangkan Dusun Gatok berada di perbatasan desa sebelah selatan dengan luas 5,30 HA. Letak lokasi tanah yang diajukan legalitasnya oleh masyarakat yang berada di areal PTPN XII Ngrangkah Pawon yang menjadi perebutan aset, dan statusnya menjadi tanah sengketa. Masyarakat mempunyai dasar sejarah sehingga meyakini bahwa daerah perkampungan yang ada pada Dusun Badek dan Gatok tidak termasuk aset PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Sejarah tanah Desa Sepawon menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, karena dari sejarah pertanahan di Desa Sepawon ini juga yang menjadi dasar tuntutan masyarakat mengenai legalitas tanah, termasuk di dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah memahami konteks sosial tanah di Desa Sepawon dan

alasan munculnya konflik dari masyarakat kepada PTPN XII Ngrangkah Pawon.

peneliti merangkaikannya dengan periode waktu saat itu, sebagai berikut :

Tabel 6 - Kronologi Sejarah Tanah Desa Sepawon

Tahun	Keterangan
1920	<p>Daerah masih hutan belantara, kemudian dilakukan babat alas yang dilakukan salah satu warga yakni bernama Diposulaksono. Tanah tersebut dipergunakan untuk bercocok tanam. Luas lahan yang dijadikan pertanian warga seluas 350 Ha dengan rata – rata luas kepemilikan tanah minimal 0,5 per kepala keluarga.</p> <p>Tanah bukan saja dimanfaatkan untuk pertanian, namun juga dimanfaatkan untuk membangun permukiman dan membentuk beberapa perkampungan. Ada beberapa fasilitas umum yang dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat seperti gedung sekolah, tempat ibadah dll (<i>bukti : pondasi rumah warga, bekas sekolah, bekas makam</i>)</p> <p>Jumlah penduduk bertambah banyak masyarakat membuka lahan baru, kemudian muncullah perkampungan baru yakni Sumberejo, Kampung Pulo, Kampung Pakelan, Kampung Glatik, dan Kampung Ngrangkah.</p>
1923	<p>Belanda membuka lahan perkebunan disekitar perkampungan warga. Kemudian dipercacakan kepada Perkebunan N.V Cultuur Matschapy Ngrangkah Sumber Glatik Gevestigde to Surabaya, N.V Cultuur Matschapy Badek Gevestigde to Surabaya, N.V Cultuur Matschapy Babadan Gevestigde to Surabaya,</p> <p>Walaupun ada perkebunan milik Belanda, namun ada batasan jelas antara tanah garapan warga dari hasil membuka semak belukar dengan lahan perkebunan milik Belanda</p>
1942	<p>Belanda kalah dari Jepang, tanah perkebunan milik Belanda dikuasai Jepang termasuk perkebunan Belanda Verbonding Badek dengan luas 450 Ha</p> <p>Pendataan administrasi. Kelima kampung yaitu Sumberejo, Kampung Pulo, Kampung Pakelan, Kampung Glatik, dan Kampung Ngrangkah masuk ke bdlam administratur Desa Djarak (<i>bukti fotocopy atas nama warga Soemini dan Samiran yang dikeluarkan pada tahun 1968</i>)</p> <p>Sejak saat itu berdiri beberapa fasilitas yang dibangun yakni Sekolah Rakyat, tempat ibadah, dll (<i>bukti fotocopy rapor atas nama Sukartini di kelurkan pada tahun 1957</i>)</p> <p>Saat penjajahan Jepang, laki – laki banyak yang dibekerjakan menjadi Romusha, sehingga lahan garapan masyarakat menjadi terlantar dan tidak terurus</p>
1945	Indonesia merdeka, kabar baik untuk seluruh rakyat termasuk masyarakat Desa Jarak
1946	Bupati Kediri saat itu bernama Bupati Jumari melalui pamong setempat meminta masyarakat untuk membabat dan merawat kembali tanah garapan mereka
1947 - 1948	Agresi Belanda dan mulai mengintervensi aset tanah yang pernah di kuasai termasuk tanah perkebunan. Namun hal ini tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan garapan karena ada batasan yang jelas antara tanah garapan masyarakat dengan perkebunan Belanda sesuai kesepakatan yang pernah ada diantara masyarakat dan Belanda.

1950	Rombongan masyarakat dari Kawedanan Pare mendatangi warga dan menyarankan untuk memanfaatkan tanah garapan secara turun – temurun
	Pada saat itu masyarakat juga sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. <i>(Bukti pembayaran pajak atas nama Sedekah alamat Dusun Badek tahun pajak 1950 di keluarkan oleh kantor pembayaran pajak Kepala Desa Djarak hingga tahun 1961)</i>
1958	Pemerintahan Soekarno mengeluarkan dan menetapkan PERPU Nasionalisasi perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia UU No 86/1958 LN 1958, No 162.
1959	Pemerintah mengeluarkan PP No 19 tahun 1959 untuk memperkuat PERPU Nasionalisasi perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia UU No 86/1958 LN 1958, No 162. Sejak saat itu seluruh bekas perkebunan atau perusahaan milik Belanda di kuasai negara, termasuk tanah N.V Cultuur Matschapy Ngrangkah Sumber Glatik Gevastigde to Surabaya, N.V Cultuur Matschapy Badek Gevastigde to Surabaya, N.V Cultuur Matschapy Babadan Gevastigde to Surabaya
	Tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai negara dan dirubah menjadi PPN Antan perkebunan milik Negara Republik Indonesia. Batas tanah yang terkena nasionalisasi dengan tanah garapan masyarakat masih sangat jelas batasnya
1960	Lahirilah Undang – Undang Pokok Agraria yang mengatur hukum pertanahan dengan tujuan memperkuat status hak milik atas tanah bagi setiap warga negara
1966	Terjadi perampasan tanah garapan masyarakat dengan dalih tanah tersebut masuk kedalam nasionalisasi, sehingga tanah tersebut milik negara Bukti kepemilikan tanah dirampas, dengan tindakan manipulatif dan paksaan agar masyarakat menyerahkan surat – surat berharga yang menunjukkan kepemilikan tanah untuk program pemutihan dan akan diganti dengan sertifikat. Jika mmasyarakat menolak maka masyarakat dianggap menjadi anggota PKI, kemudian masyarakat diberikan kartu IKBRA (Ikatan Karyawan Brawijaya) Sejak saat itu tanah hasil rampasan dikelola oleh pihak militer, menjadi perkebunan karet dengan mengatasnamakan Prigif (Proyek Gabungan ABRI), masyarakat dipaksa bekerja dikebun tersebut Setelah adanya perampasan tanah, seluruh masyarakat yang ada di perkampungan Kampung Pojok, Karangsari, Badek, dan Kampung Timur digusur lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu, di satu wilayah yang mana wilayah ini adalah bekas garapan warga dari 350 Ha dan diberi nama penampungan, dan berganti nama menjadi Badek baru dengan luas wilayah 16,00 Ha sisanya masuk ke dalam areal perkebunan dengan alasan mempermudah pengawasan Realita di lapangan luas tanah yang sebenarnya adalah 10 Ha, dan warga dijanjikan sertifikat tanah namun samapai sekarang belum terealisasi
1971	Wilayah penampungan yang tadinya masuk kedalam wilayah administrasi Desa Djarak kemudian dialihkan ke wilayah administrasi Desa Sepawon
1972	Tanah yang sebelumnya dibawah pengelolaan ABRI akhirnya pindah kepemilikan, dari pengelolaan Brigif digabung dengan PPN XII, tanpa sepengetahuan masyarakat
1975	Perkebunan melakukan perluasan kembali, dan melakukan

	penggusuran di beberapa wilayah yang kemudian menempatkan masyarakat di lahan semak belukar
	Dari pengelolaan yang dilakukan oleh PPN XII beralih dibawah kekuasaan PTPN XII Ngrangkah Pawon, dan masyarakat tidak mengetahui proses peralihan tersebut
	Peralihan menjadi PTPN XII menjadikan permasalahan baru karena berhubungan dengan HGU, dimana areal yang diajukan tidak hanya perkebunan namun juga tanah garapan dan permukiman masyarakat dengan alasan bahwa tanah – tanah tersebut adalah tanah negara berdasarkan bekas hak Erpacht dengan nama N.V Cultuur Mij Badek, N.V Cultuur Mij Ngrangkah Sumber Glatik, N.V Cultuur Mij Babadan yang terkena nasionalisasi
1987	Muncul Surat Keputusan dari Mendagri SK No.11/HGU/DA/87 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXII (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII) dan HGU No.1/Sepawon dengan total luas 2.549,91 Ha
	Dalam Surat Keputusan Mendagri SK No.11/HGU/DA/87 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XXII (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII) dalam ketetapan No empat (4) ayat tiga (3) memberikan penjelasan “apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah dan belum mendapat penyelesaian, maka kewajiban / tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku” Namun pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon tidak melakukan upaya dalam menanggapi isi surat tersebut dengan masyarakat, inilah yang membuat masyarakat kecewa dan belum menemukan solusi dari permasalahan tanah garapan dan permukiman asli masyarakat.

(Sumber : Data resume Serikat Tani Tunggal Wulung, diolah oleh peneliti)

Dusun Petung Ombo adalah satu – satunya dusun yang masyarakatnya mempunyai sertifikat tanah. Hal tersebut dikarenakan masyarakatnya tidak bersedia menyerahkan surat – surat kepemilikan tanah yang pada saat itu diminta oleh ABRI. Penolakan penyerahan surat – surat tanah di Dusun Petung Ombo dikoordinir salah satu warga, karena merasa penyerahan tersebut akan berakibat kerugian kepada masyarakat sendiri. Dampak dari hanya ada satu dusun yang mempunyai sertifikat tanah mempengaruhi pendapatan pajak Desa Sepawon. Ini pun menjadi keluhan dari pemerintah desa karena pendapatan pajak PBB hanya dari Dusun Petung Ombo namun secara administrasi dan luas wilayah harus mengurus lima Dusun.

“Ya jelas dirugikan, kalau kita bicara mengenai pemasukkan ya Mbak. Soalnya yang bayar pajak di desa ini kan cuma dari Petung Ombo saja,

kalau kita bandingkan dengan luas wilayah dan potensi desa, tentu ini merugikan. Kalau menurut saya kenapa harus dipersulit, wong masyarakat disana saja sangat bersedia bayar pajak, toh kalau bayar pajak pun masuknya juga negara juga” (9 Desember 2018)

4.3 Konflik antara Masyarakat Desa Sepawon dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan PTPN XII Ngrangkah Pawon tidak terlepas dari sejarah masa lalu mengenai permasalahan tanah Desa Sepawon.

Masyarakat merasa kecewa dan marah akibat tanah garapan dan perkampungannya diambil paksa pihak militer dengan dalih nasionalisasi aset bekas perkebunan Belanda. Sehingga masyarakat harus tergusur bahkan tergusur sampai ke semak belukar dan di aliran lahar Gunung Kelud. Peneliti mencoba membedakan konflik yang terjadi di Desa Sepawon dalam dua masa, yakni masa lalu dan masa sekarang yang berkaitan langsung dengan Serikat Tani Tunggal Wulung.

1. Konflik Masa Lalu

Konflik ini sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon, namun kepada pemerintah yang dalam perkembangannya termasuk PTPN XII Ngrangkah Pawon. Awal mula permasalahan ada pada kebijakan nasionalisasi aset bekas perkebunan dan perusahaan Belanda yang dikelola oleh negara pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1960 keluarlah Undang – Undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai status hak tanah, yang akhirnya pada tahun 1966 mulai terjadi perampasan tanah garapan dan perkampungan warga yang sebenarnya tidak masuk kedalam wilayah perkebunan Belanda.

Perampasan tanah tersebut dilakukan oleh pihak militer dengan melakukan pendekatan manipulatif bahkan tekanan terhadap warga. Surat – surat yang membuktikan kepemilikan tanah diambil dengan dalih akan diganti dengan sertifikat tanah, jika ada masyarakat yang menolak akan dianggap sebagai warga

yang tidak taat terhadap pemerintah dan dianggap sebagai anggota PKI. Tanah rampasan tersebut dikelola oleh militer dengan mengatasnamakan Prigif (Proyek

Gabungan ABRI) dan memaksa masyarakat untuk bekerja pada perkebunan tersebut yang pada saat itu dijadikan perkebunan karet. Masyarakat hanya diberi upah 1 rupiah/ hari padahal sebelum tanah tersebut diambil paksa, masyarakat bisa mendapatkan pendapatan 10 rupiah per hari, dan tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh pihak militer.

Perampasan tanah terjadi di beberapa perkampungan, yang akhirnya membuat masyarakat tergusur dan dipindahkan di semak belukar bahkan di aliran lahar Gunung Kelud. Dari luas tanah yang awalnya 350 hektar yang merupakan tanah garapan dan perkampungan masyarakat, dipangkas menjadi 16,00 hektar dengan alasan nasionalisasi aset, yang pada kenyataannya luas tanah yang tersisa hanya 10,00 hektar saja. Akibat dari perampasan tanah tersebut masyarakat menjadi marah dan melakukan tindakan agresif kepada pengelola sehingga kondisinya tidak kondusif. Untuk meredakan amarah masyarakat, pengelola memberikan janji untuk memberikan sertifikat tanah dan masyarakat yang terkena perampasan dijadikan karyawan di pabrik perkebunan. Namun setelah kondisi kembali membaik, pemecatan karyawan dengan dalih PKI kembali terjadi dan janji sertifikat tanah tidak didapatkan masyarakat hingga saat ini dari pengelolaan dibawah ABRI sampai berganti PTPN XII Ngrangkah Pawon. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu membekas di dalam masyarakat, sehingga kebencian terhadap militer bahkan pemerintah sangat besar. Masyarakat merasa menjadi pihak yang dirugikan atas segala hal yang terjadi pada masa lalu sampai masa sekarang.

2. Konflik Masa Sekarang

Konflik masa sekarang yang dimaksud peneliti adalah konflik yang timbul saat Serikat Tani Tunggul Wulung terbentuk dengan melakukan gerakan penuntutan legalitas tanah tempat tinggal. Ada beberapa permasalahan yang timbul saat proses gerakan berlangsung yakni

- 1) *Audienci* yang dilakukan kepada PTPN XII Ngrangkah Pawon selalu tidak bisa terlaksana. Surat yang dikirimkan Serikat Tani Tunggul Wulung yang menanyakan mengenai kejelasan tanah tanah garapan dan perkampungan masyarakat tidak direspon.
- 2) Adanya kasus yang menurut Serikat Tani Tunggul Wulung ada kaitannya dengan pihak pabrik mengenai pemanggilan ketua Serikat Tani Tunggul Wulung ke kantor Polsek Plosoklaten, atas tuduhan penipuan uang pengajuan sertifikat. Namun setelah ditelusuri pengajuan laporan bukan dilakukan masyarakat yang ikut serta dalam pengajuan dan masyarakat yang lainnya tetap bersedia melanjutkan pengajuan tersebut.
- 3) Mengintimidasi beberapa warga yang bekerja di perkebunan PTPN XII Ngrangkah Pawon sekaligus ikut dalam pengajuan sertifikat tanah
- 4) Menghentikan pengukuran tanah dari pihak BPN Kabupaten Kediri, dengan mengklaim bahwa tanah yang diajukan masyarakat dalam pengajuan sertifikat adalah aset PTPN XII Ngrangkah Pawon. Namun tidak mau menjelaskan bukti aset kepemilikan dengan acuan sejarah tanah Desa Sepawon. Sehingga pengukuran tanah dihentikan dan status tanah yang diajukan masyarakat masuk kedalam tanah sengketa.

Sumber : Data wawancara Serikat Tani Tunggul Wulung

4.4 Serikat Tani Tunggul Wulung

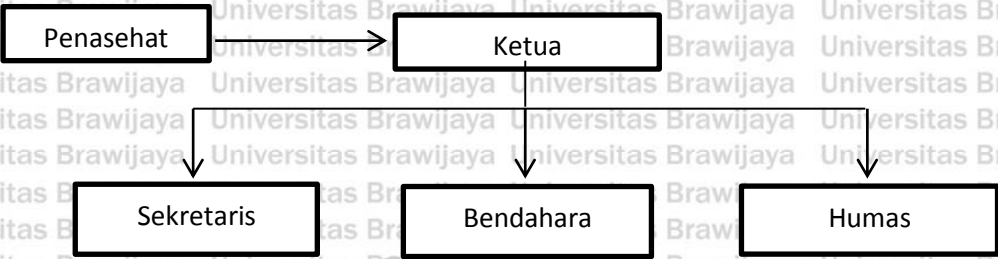
Lahirnya Serikat Tani Tunggul Wulung adalah dari kekhawatiran beberapa

masyarakat tentang tempat tinggal yang mereka tempati karena tidak adanya legalitas kepemilikan tanah tempat tinggal yang mereka miliki. Aktor yang menginisiasi untuk membuat kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama ingin mempunyai sertifikat tanah adalah Bapak Legimin, beliau mengajak Bapak Koesno yang sekarang menjabat sebagai sekertaris Serikat Tani Tunggul Wulung untuk bertemu dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ratu Adil dari Blitar yang sebelumnya juga telah membantu masyarakat di sebelah desa, yakni Desa Summersari Petung untuk mendapatkan hak tanah masyarakat.

Dari pertemuan tersebut dilakukan pemetaan masalah dan penyampaian keinginan dari masyarakat. Dari situ LSM Ratu Adil yang diwakili oleh salah satu anggotanya yang bernama Nanik Haryanti memberikan masukan untuk membuat organisasi masyarakat tentang pengajuan sertifikat tanah karena jika pengajuan yang dilakukan secara personal tidak akan efektif dan cenderung mengalami kegagalan. Dari situlah lahir Serikat Tani Tunggul Wulung pada tahun 2015 untuk mewadahi masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pengajuan sertifikat tanah di Desa Sepawon, khususnya dua Dusun yakni Gatok dan Badek.

Menindaklanjuti pertemuan personal Bapak Legimin dengan Ibu Nanik Hariyanti, mereka menghimpun warga masyarakat yang tertarik bergabung untuk membentuk organisasi kepengurusan dan membuat strategi untuk langkah selanjutnya. Dasar strategi yang diambil oleh Serikat Tani Tunggul Wulung adalah pendekatan politik hukum dan menghindari segala macam bentuk anarkis untuk menghindari konflik antara warga dengan pihak PTPN XII. Dari pertemuan tersebut terbentuklah pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung yang berjumlah 5

orang, dengan spesifikasi jabatan Pak Legimin sebagai ketua, Pak Koesno sebagai sekertaris, Pak Dwip sebagai bendahara, Pak Lamidi sebagai humas, dan Pak Suyono sebagai penasehat. Menariknya 4 dari 5 pengurus tersebut adalah mantan mandor dari pabrik perkebunan PTPN XII Ngrangkah Pawon, yang dahulu memiliki posisi yang strategis dan dipercaya oleh pihak pabrik.



Bagan 2 - Struktur Organisasi Serikat Tani Tunggul Wulung

(Sumber : Data Serikat Tani Tunggul Wulung)

Keterangan :

Penasehat : Memeberikan masukan, saran, dan mendampingi ketua ketika menyusun strategi

Ketua : Bertanggungjawab penuh dalam jalannya organisasi (memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan organisasi), membuat dan mengesahkan segala keputusan mengenai strategi yang telah disepakati bersama

Sekretaris : Membuat dan mengesahkan keputusan bersama ketua dalam bidang administrasi, melakukan segala kegiatan pengelolaan administrasi dalam organisasi Serikat Tani Tunggul Wulung

Bendahara : Membuat dan mengesahkan keputusan bersama ketua dalam bidang keuangan, melakukan segala pengelolaan keuangan baik secara internal organisasi maupun keungan dalam pengajuan yang telah diberikatan masyarakat

Humas : Melaksanakan strategi yang telah dibuat bersama ketua dalam hal menarik simpatisan, menyampaikan informasi, persuasi maupun perkembangan gerakan kepada masyarakat.

4.5 Deskripsi Aktor

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Legimin

Bapak Legimin (64 tahun) merupakan Ketua Srikat Tani Tunggul Wulung, pemilihan Bapak Legimin sebagai informan karena mengetahui dan berkenaan secara langsung tentang alasan terbentuk dan kegiatan Serikat Tani Tunggul Wulung. Selain itu peranan Bapak Legmin ini juga sangat besar pada kelompok

Serikat karena keputusannya mempengaruhi jalannya kelompok. Beliau juga menjalin relasi dengan Bu Nanik Hariyanti yang mana merupakan LSM yang membantu membentuk sekaligus mengawal kegiatan Serikat Tani Tunggul Wulung.

Beliau merupakan ketua LPMD Desa Sepawon, dan dulunya menjabat sebagai pala kampung Dusun Badek (setingkat kepala dusun). Pemilihan beliau menjadi pala kampung atas kebijakan pabrik karena dulunya beliau bekerja sebagai mandor di pabrik dan mempunyai hubungan yang baik dengan pabrik (PTPN XII Ngrangkah Pawon). Fungsi dari pala kampung sendiri adalah menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pabrik, seperti penyalur aspirasi masyarakat, maupun penyampaian kebijakan dari pihak pabrik yang berkenaan langsung kepada masyarakat dusun.

2. Bapak Koesno

Bapak Koesno (65 tahun) merupakan bendahara kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung dan menjadi salah satu aktor yang menginisiasi pengajuan sertifikat tanah yang kemudian bersama Pak legimin melakukan kerjasama kepada LSM Ratu Adil. Dahulu juga menjadi mandor di pabrik PTPN XII Ngrangkah Pawon. Tugas utamanya adalah melakukan pendataan dan pengumpulan uang pengajuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dikelola bersama pada satu rekening, yang sampai saat ini uang iuran masyarakat sudah disalurkan kepada pihak BPN Kabupaten Kediri dan sebagainya disimpan untuk biaya pengukuran maupun pasang patok tanah dikemudian hari.

3. Bapak Dwi Priyono

Bapak Dwip (64 tahun) merupakan sekretaris kelompok Serikat Tani Tunggul Wulung yang mana di rumah beliau juga menjadi tempat sekretariat Serikat Tani Tunggul Wulung. Beliau juga merupakan mantan mandor pabrik PTPN XII Ngrangkah Pawon. Awal mula beliau ikut menjadi pengurus adalah, dipilih secara langsung oleh Pak Legimin atas dasar kepercayaan yang kemudian

beliau menerimanya. Tidak ada tugas yang cukup terlihat pada beliau yang merupakan sekretaris, karena data maupun berkas semuanya diserahkan dan dibawa oleh ketua dan pendamping yakni Ibu Hariyanti selaku pendamping dari LSM

4. Ibu Nanik Hariyanti

Ibu Nanik Hariyanti yang biasa dipanggil Mbak Yanti ini merupakan pendamping dari LSM. Ada beberapa LSM yang beliau ikuti seperti Ratu Adil Blitar, AGRA (Aliansi Gerakan Refirma Agraria), maupun ikut bergabung pada JPKP Nasional (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan). Diluar keaktifan beliau dalam keikutsertaan di beberapa LSM, beliau juga bekerja menjadi advokat. Pertemuannya dengan Pak Legimin dan Pak Koesno tidak lepas dari penampungan beliau dalam kasus sengketa tanah yang berlokasi disebelah Desa Sepawon, yakni di Desa Summersari Pucung yang mana terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak swasta, yang berujung pelepasan aset tanah oleh pihak swasta dan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah yang ditempatinya tersebut.

5. Bapak Syamsul Huda

Bapak Syamsul Huda merupakan staf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri yang berada pada posisi Seksi Sengketa Konflik bidang Pengendalian.

Pemilihan informan dari BPN karena ingin mengetahui lebih dalam tanggapan BPN mengenai permasalahan tanah di Sepawon dan proses tahapan pengajuan dari Serikat Tani Tunggul Wulung. Proses pengajuan sertifikat tanah belum bisa diproses karena adanya klaim dari pihak PTPN XII, sehingga menjadikan tanah yang diajukan tersebut masuk kedalam tanah sengketa, namun semua berkas dan uang yang sudah diberikan Serikat Tani Tunggul Wulung sudah diproses, sehingga jika sudah ada keputusan yang pasti bahwa pihak PTPN XII

melepaskan atau pun memberikan persetujuan dari tuntutan masyarakat, maka pengukuran tanah akan segera dilakukan.

6. Bu Naning, warga Dusun Badek berusia 47 tahun

Pemilihan informan dari salah satu warga Dusun Badek yang ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah yang diinisiasi oleh Serikat Tani Tunggul Wulung.. Ikutsertaan Bu Naning juga dipengaruhi ajakan dari tetangganya yang tidak lain juga merupakan pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung.

7. Bu Siti Patimah, warga Dusun Gatok 50 tahun

Bu Siti Patimah merupakan warga Gatok, yang juga merupakan istri dari kepala RT setempat, yang juga menjadi koordinator pengumpulan berkas warga yang ikut di wilayah dusun Gatok. Pemilihan informan ini juga membantu melihat perkembangan keikutsertaan warga Gatok yang mengajukan pengajuan sertifikat tanah melalui Serikat Tani Tunggul Wulung.

8. Rahmad Sudrajad

Bapak Sudrajad merupakan Kaur pemerintahan Desa Sepawon. Pemilihan informan dari pihak pemerindah desa untuk melihat bagaimana hubungan kooedinasi dari Serikat Tnai Tunggul Wulung dengan pihak desa, serta melihat peran pemerintah desa dalam membantu permasalahan tanah yang ada di Desa Sepawon, karna secara kewilayahan sangat mempengaruhi karena 4 dari 5 dusun yang ada di Desa Sepawon, tanah yang menjadi tempat tinggal warga tidak ada legalitasnya.

BAB V

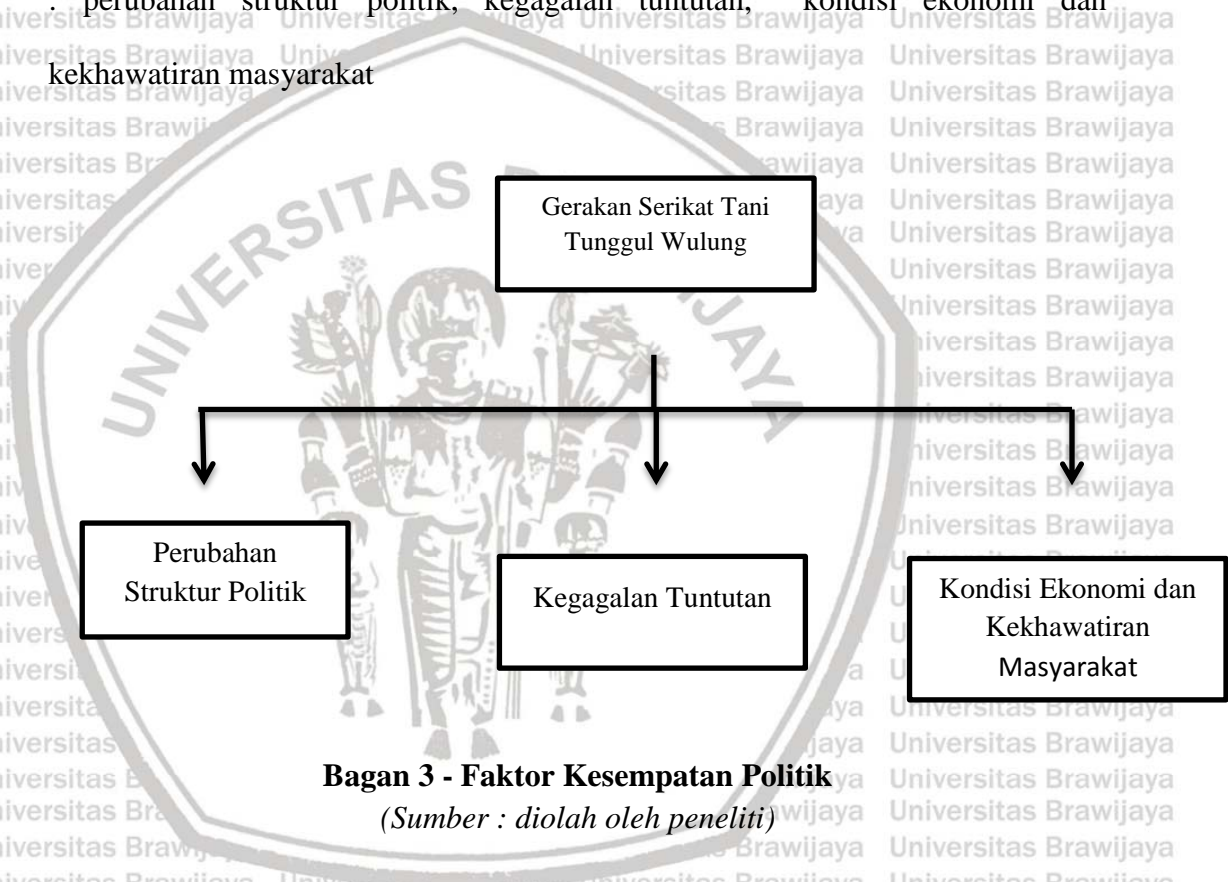
PEMBAHASAN

5.1 Struktur Kesempatan Politik : Peluang dan Kekhawatiran Masyarakat

Kesempatan politik dalam gerakan sosial memfokuskan pada faktor faktor yang memungkinkan munculnya suatu gerakan sosial yang dibentuk dengan

sengaja dan mempunyai pengaruh dalam perkembangan gerakan sosial. Menurut Oliver dalam (Hidayat, 2012) Struktur kesempatan politik menghasilkan ruang multidimensi, yang mana bisa menghasilkan gerakan maupun merepresi gerakan sehingga gerakan tidak akan mudah untuk dihasilkan.

Ada faktor – faktor yang dominan yang menjadi dasar lahirnya Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan perjuangan pengajuan legalitas tanah tempat tinggal di dua Dusun yakni Gatok dan Badek yang lokasinya masuk kedalam areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan proses berkembangnya Serikat Tani Tunggul Wulung antara lain : perubahan struktur politik, kegagalan tuntutan, kondisi ekonomi dan kekhawatiran masyarakat



5.1.1 Perubahan Struktur Politik

Struktur kesempatan politik yang tercipta tidak terlepas dari adanya perubahan struktur politik. Almond dan Coleman dalam (Kartaprawira, 2007)) menegaskan dalam kehidupan demokratis, struktur politik dibedakan menjadi dua, yakni (1) formal : struktur politik yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh masyarakat dengan sah dengan segala keputusannya, dan (2) informal : struktur

politik yang mempunyai kendali untuk mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam penyaluran aspirasi hingga tuntutan demi kepentingan umum.

Struktur politik juga mempengaruhi dalam terbentuknya budaya politik yang ada di dalam masyarakat. Menurut Muta'hi dalam (Hidayat, 2012) iklim politik terbuka, seperti kemudahan penyampaian aspirasi oleh rakyat ataupun pemerintah yang memberikan wadah ruang publik ke masyarakat akan membuat perkembangan gerakan sosial, dan sebaliknya jika iklim politik tertutup dan kaku akan membatasi perkembangan gerakan sosial. Ini terlihat jelas dalam periode era orde baru dan reformasi. Pada era orde baru, yang mempunyai ciri pemerintahan yang sentralisasi dengan corak kepemimpinan yang otoriter, membuat kebebasan berpendapat dan mengkritisi suatu hal menjadi sangat minim dilakukan masyarakat. Ini pula lah yang mempengaruhi tidak berkembangnya gerakan - gerakan akar rumput berkembang secara luas dan teresponse media.

Dampak dari iklim politik yang tertutup pada era orde baru juga dirasakan oleh masyarakat Desa Sepawon yang kaitannya dengan permasalahan tanah. Setelah nasionalisasi aset perusahaan asing pada tahun 1957 oleh kepemimpinan Presiden Soekarno, yang kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai tahun 1998 dengan gaya kepemimpinan yang otoriter membuat masyarakat tidak berani dalam menyuarakan pendapat maupun melakukan tindakan dalam menuntut tanah

“Saya rasa kalau sekarang ini beda ya mbak kayak jamannya Pak Soeharto tiba ilang. Kalau sekarang kan sudah beda, lebih demokratis, rakyat bisa lebih leluasa.” (wawancara 7 Desember 2018)

Setelah orde baru runtuh dan munculnya era reformasi, disinilah mulai banyak pembenahan mengenai paradigma lama, hak hak dasar manusia mulai diperhatikan, ideologi semakin terbuka. Kebebasan menjadi hal baru yang sudah lama diinginkan oleh masyarakat, pemerintah yang lebih demokratis dan memperbolehkan berserikat bahkan melakukan kritik terhadap pemerintah. Jika

dihubungkan dengan kasus ini, lahirnya Serikat Tani Tunggul Wulung juga tidak terlepas dari struktur politik yang dibentuk oleh pemerintah dan sesuai kebijakan

pemerintah. Dalam kaitannya dengan masa kepemimpinan saat ini, agraria menjadi salah satu hal yang diprioritaskan karena masuk dalam kebijakan nawacita pada pemerintahan Jokowi. Dalam implementasinya adalah memepermudah masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah dan pemberian sertifikat tanah gratis di beberapa tempat yang selama ini belum mendapatkan legalitas tanah.

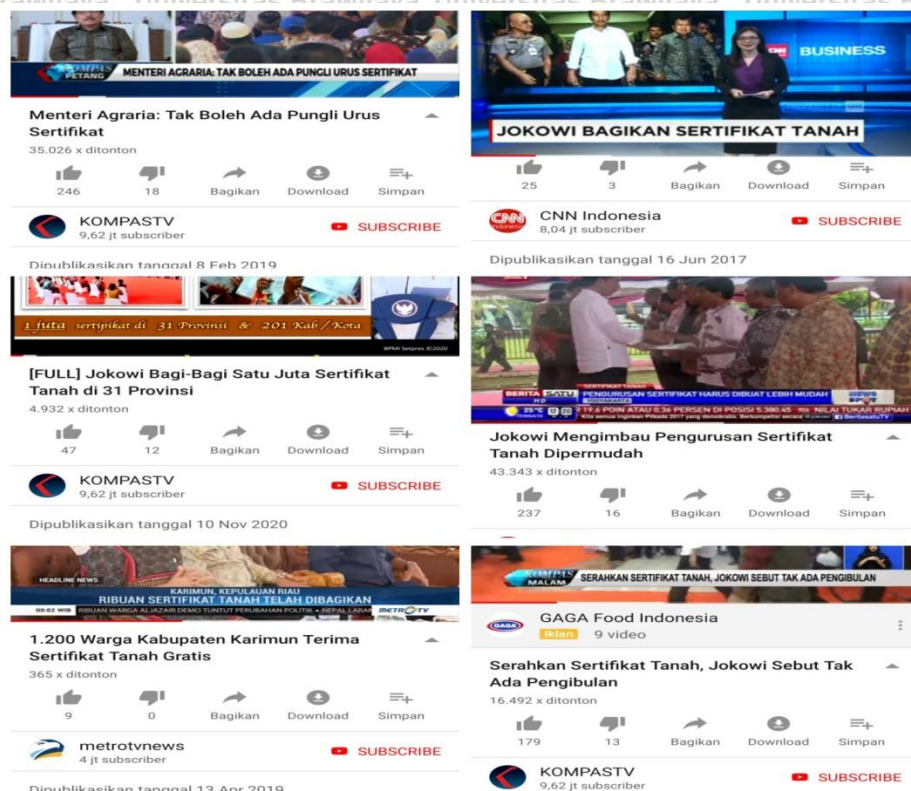
Adanya kepemimpinan dari Presiden Jokowi pada tahun 2014, dengan salah satu programnya konsen mengenai reforma agraria, dibentuklah Kementerian agraria dan Tata Ruang, dan membuat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati tanggal 24 September. Pada tahun 2018 Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (2018) dengan tujuan perencanaannya ada pada pasal 4 salah satunya untuk perencanaan kapasitas hukum dan peningkatan legalitas TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), serta penanganan sengketa dan konflik agraria. Dalam implementasi kebijakan tersebut, hal ini pun juga selaras dengan misi dari program yang diusung oleh Jokowi-Ma'ruf pada pemilihan 2019

“...Melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah tanah milik rakyat dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah dari sengketa atas tanah” (Setiawan, 2019)

Dengan adanya program pemerintah mengenai PRONA, yang salah satu implementasinya adalah pemberian sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat yang beberapa kali diliput oleh media massa, baik cetak maupun televisi ini menjadi momentum yang tepat yang dimanfaatkan oleh Pak Legimin untuk melakukan gerakan. Media membantu penyebaran informasi program pemerintah, apalagi peliputan mengenai pembagian sertifikat secara cuma – cuma

membentuk pengharapan masyarakat untuk merasakan hal yang sama setelah bertahun – tahun hidup dengan kekhawatiran akan digusur. Inilah yang melandasi

terbentuknya Serikat Tani Tunggul Wulung dan adanya program pemerintah dimanfaatkan untuk menarik simpatisan masyarakat untuk juga melakukan pengajuan yang dikoordinir oleh Serikat Tani Tunggul Wulung.



Gambar 4 - Capture Berita Program PRONA di Media Massa
(Sumber : Youtube Kompas TV, MetroTV, CNN Indonesia, Berita Satu)

“saya mengikuti sesuai program dari Pak Jokowi, kalau kita boleh tau dan kita mengerti kan pada saat presiden Jokowi ini sedang lagi memprogramkan tanah yang ditempati warga berpuluh – puluh tahun itu bisa diuruskan sertifikasinya kan gitu, maka daripada itu sehubungan tanah disini ini statusnya belum ada belum jelas, maka saya melangkah untuk menindak lanjuti tentang program presiden sekarang yang dipegang oleh Pak Jokowi. Ini kan mumpung ada program dari Pak Jokowi kita selaras kita mengikuti program mereka, apa salahnya sih ?” (wawancara 8 Desember 2018)

Citra dari elite politik juga mempengaruhi dari Sosok dari Presiden Jokowi yang dianggap merakyat dan pro rakyat dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk membantu dalam kasus permasalahan tanah di Desa Sepawon.

“terlebih Pak Jokowi itu kan pemimpin dari rakyat, sangat merakyat, ya saya yakin pasti akan dibantu. Saya udah gak percaya dengan orang militan ya. Soalnya yang dilawan ini kan juga negara, jadi ya pasti

bakal banyak yang gembosi. Minimal ada keyakinan dari kami mbak, kami gak menyalahi aturan dan sesuai dengan program pemerintah.” (wawancara 8 Desember 21018)

Rasa percaya terhadap sosok pemimpin membuat Pak Legimin memberanikan diri untuk melangkah dalam melakukan pengajuan sertifikat tanah untuk tempat tinggal yang selama ini masuk kedalam areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Namun dengan pertimbangan dan persiapan yang matang, dengan melakukan pendampingan dari pihak LSM.

5.1.2 Kegagalan Tuntutan

Permasalahan mengenai legalitas tanah tempat tinggal menjadi *konse*n dari masyarakat, jauh sebelum munculnya Serikat Tani Tunggul Wulung. Diskusi maupun gerakan sudah mulai terbentuk dari tahun 2006, namun dilakukan secara perseorangan tanpa adanya pendampingan dari pihak LSM.

“Ya sebelum kami dari Ratu adil mendampingi, sebenarnya mereka sudah melakukan gerakan selama kurang lebih dua belas tahun dan selama dua belas tahun ini tidak ada perkembangan apapun, dan ini menjadi salah satu alasan mereka menemui kita, temen temen di Ratu adil” (wawancara 15 Desember 2018)

Bahkan sudah ada dua kali tuntutan permasalahan tanah Desa Sepawon dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon di ranah hukum. Pada kasus yang sebelumnya gerakan tersebut dikoordinir perseorangan yang masuk kedalam perkara perdata yakni :

1. Perkara perdata tanggal 7 Oktober 2010 No. 77/Pdt.G/2010/PN.Kdi Suhardi dkk (67 orang) melawan PT Perkebunan Nusantara XII, turut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Juli 2011 No. 77/Pdt.G/2010/PN.Kdi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Januari 2012 No. 699/Pdt.G2011/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2013 No. 2498 K/Pdt/2012 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima.
2. Perkara perdata tanggal 18 Oktober 2012 No.74/Pdt.G/2012/PN.Kdi Suyadi dkk (34 orang) melawan PT Perkebunan Nusantara XII, turut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Desember 2013 No. 74/Pdt.G/2012PN.Kdi jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya tanggal 15 September 2014 No 366/Pdt./2014/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 2016 No. 2357 K/Pdt/2016 menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

(Sumber : Resume Berkas Sepawon oleh BPN Kabupaten Kediri)

Namun gugatan tersebut tidak diterima karena adanya klaim dari PT Perkebunan Nusantara XII bahwa tanah yang menjadi tuntutan masyarakat masih menjadi aset PT Perkebunan Nusantara XII.

Pada gerakan sebelumnya dikoordinir perseorangan, dan sempat melakukan pengumpulan dana kepada masyarakat, dipergunakan dalam mengurus tuntutan yang sedang dilakukan.

“Dulu pernah ada tuntutan kok mbak, yang ngordinir itu orang Ngrangkah, udah narikin iuran juga ke warga, tapi ket saiki yo gaenek kabar. Malah jare wes ngentekne sapi barang mbak, ge ngurus ngurus iku kabare” (wawancara 7 Desember 2018)

(Dulu pernah ada tuntutan kok mbak, yang mengordinir orang dari Dusun Ngrangkah, sudah minta iuran uang ke warga, tapi sampai sekarang tidak ada kabar kelanjutan. Bahkan ada berita, kalau dia sampai menjal sapi, untuk ngurus tuntutan itu)

Dari adanya kegagalan pada dua tuntutan sebelumnya di ranah hukum, membuat Pak Legimin yang merupakan inisiator dalam pengajuan sertifikat tanah menjadi lebih hati –hati dalam menyusun strategi yang akhirnya mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada LSM Ratu Adil, yakni Bu Nanik Haryanti. Keputusan ini diambil karena melihat kasus di Sumpalsari Petung yang berada tidak jauh dari Desa Sepawon mengalami hal serupa, yakni masyarakat melawan perusahaan yang juga diadvokasi oleh LSM yang sama, yakni LSM Ratu Adil.

Setelah melakukan observasi data maupun pemetaan permasalahan, akhirnya diberikan saran oleh Bu Nanik Haryanti untuk membentuk kepengurusan dan organisasi agar dengan dasar hukum yang jelas. Ini dilakukan agar tuntutan lebih kuat dan terarah. Sehingga muncullah Serikat Tani Tunggal Wulung, dengan beranggotakan 6 pengurus. Dengan tujuan utamanya adalah sebagai wadah untuk

masyarakat Desa Sepawon, yang saat ini terfokus di dua dusun saja yakni Dusun Badek dan Gathok, jika masyarakat ingin melakukan pengajuan sertifikat tanah.

Pertimbangan – pertimbangan yang diambil, bertujuan untuk tidak gegabahnya mengambil keputusan dan penyusunan strategi, serta menghindarkan diri dari kesalahan tuntutan yang tanpa dasar yang jelas secara hukum seperti dua tuntutan sebelumnya. Inipun yang jadi pembeda dari dua tuntutan sebelumnya. Dasar yang dipakai Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan permintaan tuntutan pun sesuai memakai dasar SK Mendagri tahun 1987 tentang HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon yang pada pasal 4 ayat 3 mengakui tentang tanah garapan masyarakat dan meminta pengelola Hak Guna Usaha PTPN XII Ngrangkah Pawon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kalau gerakan ini jelas, jadi dasarnya temen-temen memperjuangkan hak untuk permukiman mereka itu jelas di PP 20 tahun 2014 kalau gak salah, jadi setiap warga negara yang memiliki tanah yang diduduki lebih dari 20 tahun, sedangkan di Sepawon itu mereka itu hampir 50 tahun, dan kita tidak bicara tentang HGU. Sedangkan perjuangan yang kemarin sebelum kita, jadi yang mereka perjuangkan itu keseluruhan tanah HGU itu yang mereka minta. yang kita minta sesuai dengan SK Mendagri No 11 tahun 1987 yang menyatakan bahwa tanah pemukiman yang dihuni warga seluas kurang lebih 62 hektar sekian itu dikecualikan dari HGU PTPN Ngrangkah Pawon” (wawancara 5 Januari 2019)

5.1.3 Ekonomi Masyarakat dan Kekhawatiran akan digusur

Faktor yang ketiga dari adanya adalah faktor ekonomi, mayoritas masyarakat di Dusun Badek dan Gatok termasuk kedalam kategori ekonomi menengah kebawah. Hal ini terlihat dari data Desa Sepawon yang menunjukkan ada sebesar 32% dari total 1825 keluarga yang ada di Desa Sepawon masuk kedalam kategori keluarga prasejahtera. Alasan ekonomi ini juga pun menjadi faktor pendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah dan elite politik membentuk Serikat Tani Tunggul Wulung. Warga Dusun Badek dan Gatok yang mayoritas menjadi buruh tani termasuk menjadi pekerja harian lepas dari pihak pabrik PTPN XII, dengan keadaan perekonomian yang pas pasan,

menjadi salah satu alasan pembentukan Serikat Tani Tunggul Wulung agar bisa
mewadahi kekininan warga tanpa mengganggu pekerjaan warga

“Disini kanarganya banyak yang jadi buruh tani ya di pabrik, semisal ada panen ya baru dipakek jasanya, kalau nggak ya ikut kerja di sawah orang. Kalau mereka ngurus sendiri kan malah keluar uang banyak, kayak biasa wira wiri belum ngurus ini itu, ribet apalagi ini kita sendang memperjuangkan. Jadi biarkan kita yang usahakan, mereka tetep kerja, terima beres lah mbak, biar bisa makan” (wawancara 8 Desember 2018)

Di lain sisi, sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk beberapa warga karna mempengaruhi langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat

“Bingung mbak, kalau ada sertifikat kan bisa ikut kayak program KUR dan lain lain. Bisa nambah nambah uang buat makan lah. Kalau kayak gini apa yang mau dijamin” (wawancara 8 Desember 2018)

Masyarakat di Dusun Badek dan Gatok sudah menempati tempat tinggal mereka selama berpuluh puluh tahun, mewariskan kepada anak cucu, hingga adanya keterikatan sosial dan material di dalamnya. Namun selama itu juga masyarakat merasakan rasa khawatir, jika suatu saat merka akan digusur, karna masyarakat tidak mempunyai bukti legal kepemilikan tanah tempat tinggal mereka dan ditambah lokasi tanah yang ditinggali masuk kedalam kawasan perusahaan negara, ada rasa khawatir jika ada penggusuran pun masyarakat tidak bisa melakukan perlawanan.

“Kalau dari pihak manager PTPN XII tanah tidak akan diutik utik dan tidak akan digusur itu menurut keterangan manager PTPN, tapi pemerintahan kalau suatu saat mau menggunakan tanah tidak menutup kemungkinan suatu saat tanah itu yang belum ada statusnya akan digusur kita berpikir untuk jangka panjang. Kasus dibantaran Sungai Berantas kan kayak gitu, digusur pemerintah kalau tanahnya mau digunakan” (wawancara 7 Desember 2018)

5.2 Framing dari Serikat Tani Tunggul Wulung

Framing menurut Benford dan Snow dalam (Hidayat, 2012, hal. 121) digunakan untuk memproduksi makna dan menginterpretasi kejadian tertentu yang digunakan untuk menggerakkan pengikut dan mendapat dukungan dari pihak –

pihak lain. Dalam kaitannya dengan gerakan sosial, *framing* dibutuhkan untuk menarik simpatisan dengan membuat gambaran tertentu yang menjadikan gerakan tersebut benar dan patut untuk didukung. Ini pun dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung, dengan memberikan sosialisasi agar masyarakat bisa paham apa yang sedang diperjuangkan demi kepentingan bersama.

Berkaitan dengan proses *framing*, Benford dan Snow dalam (Hidayat, 2012, hal. 121) menyebutkan tiga hal yang menjadi perhatian utama, yang disebut *core framing tasks*, yakni :

1. *diagnostic framing*, yaitu proses gerakan dengan menggunakan identifikasi masalah dan memberikan pemahaman. Pemahaman berupa sesuatu yang salah dan siapa tokoh yang terkena imbas dari kasus tersebut yang kemudian membutuhkan perubahan dalam situasi tersebut. Dalam tahap ini para aktor mendefinisikan permasalahan yang ada sesuai isu utama yang sedang terjadi dan yang sedang diupayakan adanya perubahan terhadap masalah tersebut.

Pada penelitian ini, Serikat Tani Tunggul Wulung memberikan gambaran situasi yang berbeda, yang seharusnya setiap masyarakat mempunyai hak legalitas tanah dan hidup dalam rasa aman dan nyaman di dalam rumah tempat tinggal mereka. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat yang ada di perkampungan di Dusun Badek dan Gathok. Demi mencapai situasi yang seharusnya dimiliki seperti masyarakat lain, maka harus ada pengupayaan untuk terjadi perubahan kondisi.

2. *prognostic framing*, yaitu pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi artikulasi solusi yang ditawarkan bagi persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya yang sebelumnya sudah diidentifikasi pada tahap *diagnostic framing*

Solusi dalam kasus tanah yang ada di Desa Sepawon, khususnya

Dusun Badek dan Gathok yang ingin memiliki hak legalitas tanah tempat

tinggal adalah dengan melakukan pengajuan yang diwadahi oleh Serikat Tani Tunggul Wulung. Hal ini akan menjadi solusi yang diberikan kepada masyarakat, karena pengurusannya sudah dikoordinir tanpa harus repot mengupayakan secara personal masing – masing warga apalagi kasus tanah di Desa Sepawon yang terbilang rumit karena diklaim sebagai aset dari PTPN XII Ngrangkah Pawon.

3. *motivational framing*, yaitu ajakan untuk bergerak atas dasar tercapainya sebuah perubahan, diimplementasikan dengan sebuah usaha melalui tindakan kolektif.

Tindakan kolektif yang dimaksud adalah bergabung dengan Serikat Tani Tunggul Wulung dalam melakukan pengupayaan pengajuan sertifikat tanah. Pembentukan organisasi ini pun juga tidak terlepas dari usaha mendapatkan tujuan yang selama ini diharapkan oleh masyarakat.

5.2.1 Serikat Tani Tunggul Wulung adalah identitas perjuangan masyarakat

Framing disini dilakukan pemberian definisi terhadap Serikat Tani Tunggul Wulung adalah suatu bentuk perjuangan dalam mengusahakan kejelasan tanah yang selama berpuluh – puluh tahun sudah ditempati masyarakat. Identitas mengenai perjuangan tidak terlepas karena sejarahnya sudah dua kali ada perjuangan serupa yang ingin meminta kejelasan mengenai status tanah yang diklaim dikeluarkan dari HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon, namun harus mengalami kegagalan, karena dimata hukum tidak kuat tentang permohonan yang diajukan. Sehingga identitas perjuangan ini sangat sering diucapkan oleh pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung dan beberapa masyarakat yang ikut dalam pengajuan.

“Kita ini melakukan perjuangan, kita menuntut hak yang semestinya kita dapatkan. Perjuangan kami tidak salah, sesuai kebijakan pemerintah juga, jadi gak ada kata mundur demi status tanah yang jelas” (wawancara 7 Desember 2018)

Pembentukan identitas perjuangan ini sangat digaungkan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung kepada masyarakat maupun pihak – pihak terkait yang dalam hal ini adalah PTPN XII Ngrangkah Pawon serta badan – badan terkait yang secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan permasalahan ini. Dalam pembentukan identitas perjuangan yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung kepada masyarakat, dilakukan dengan cara diskusi terbuka dan sosialisasi mengenai tanah tempat tinggal masyarakat yang belum ada status yang jelas. Sehingga Serikat Tani Tunggul Wulung menjadi wadah untuk masyarakat untuk mendapatkan hak legalitas tersebut.

“Kita adakan sosialisasi, kita pinjem rungan SD mbak, kita ajak diskusi langsung kepada masyarakat. Intinya ini lho kita bentuk Serikat Tani Tunggul Wulung punya niatan untuk merjungkain status tanah, ayo bagi warga yang ikut serta ya kami tampung, kami usahakan bareng – bareng” (wawancara 8 Desember 2018)

Dengan pendekatan sosialisai maupun pendekatan personal kepada masyarakat, membuat identitas perjuangan yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung mengakar kuat di mayarakat apalagi warga yang ikut serta dalam pengajuan sertifikat tanah. Hal tersebut tidak terlepas dari keseriusan pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung dalam membentuk *image* tersebut, misalnya pembentukan kantor sekertariatn Serikat Tani Tunggul Wulung dengan memakai plang yang besar di Dusun Badek, tentu ini pun menjadi pembeda dari gerakan sebelumnya yang secara kesiapan kantor maupun organisasi belum sematang Serikat Tani Tunggul Wulung. Sehingga masyarakat banyak yang menaruh kepercayaan bahwa Serikat Tani Tunggul Wulung adalah organisasi serius melakukan perjuangan demi mengupayakan hak masyarakat

“Pak Legimin sama temen – temennya yang ngurus semuanya mbak, ngurus kesana kemari mbak, katanya sampek Jakarta juga. Ya kita harapkan sih ada hasilnya. Kita seneng kalau ada yang bantu ngurus mbak, ini kan yang dilawan negara, saya ya apa tau ngurus ngurus kayak gini, bisanya doain saja biar orang – orang yang ngurus bisa lancar” (wawancara 8 Desember 2018)

Framing yang coba dibentuk Serikat Tani Tunggul Wulung bukan hanya sekedar memanfaatkan program pemerintah mengenai PRONA, namun juga dengan berusaha menunjukkan bukti – bukti jika tuntutan mereka ada dasarnya. Bukti yang diberikan Serikat Tani Tunggul Wulung bukan saja untuk menarik simpatisan masyarakat, namun juga pihak eksternal yang menjadi sasaran dari Serikat Tani Tunggul Wulung dengan harapan adanya bantuan penyelesaian kasus tanah di Desa Sepawon, khususnya Dusun Badek dan Gatok yang melakukan pengajuan legalitas tanah. Bukti tersebut meliputi :

Tabel 7 - Alat Bukti untuk Memperkuat Pengajuan dan Tuntutan

No	Daftar Alat Bukti	Keterangan
1	Surat Keterangan dari Desa No.62/VI/418.88/015/2011	Surat Keterangan yang menerangkan jumlah kepala keluarga yang ada di wilayah Dusun Badek dan Gatok
2	SK HGU yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri No: SK.11/HGU/DA/87	SK yang menerangkan tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan XII
3	Surat pajak atas nama Sedekah	Surat bukti pembayaran pajak atas nama Sedekah warga dusun Badek, yang dikeluarkan oleh kantor pembayaran pajak Kepala Desa Djarak tahun 1950
4	Peta Afdeling Babadan	Peta yang menunjukkan bahwa PTPN XII dulunya berasal dari beberapa afdelling yang salah satunya adalah afdelling babadan
5	Peta afdelling Sumber Glatik	Bukti bahwa lahan PTPN XII dulunya adalah dari bekas Kampong Sumber Glatik, yang kemudian menjadi nama salah satu afdelling
6	Peta luasan garapan warga yang dikuasai oleh perkebunan	Peta yang menunjukkan lahan perkebunan PTPN XII
7	Peta Afdelling Badek	Peta yang menjelaskan lokasi penampungan yang mana warga Dusun Badek mendiami wilayah tersebut
8	Peta Perkebunan	Peta yang menunjukkan luasan lahan yang di sewa Pabrik Gula Mrican
9	Peta Perkebunan	Peta luasan lahan PTPN XII Ngrangkah Pawon
10	Surat keterangan	Surat yang menunjukkan bahwa warga

	pengangkatan karyawan	yang diangkat menjadi karyawan hanya digaji Rp 1,00 pada tahun 1966
11	Fotocopy rapor Sekolah Rakyat	Bukti yang menunjukkan bahwa dulu sebelum lahan diwilayah Dusun Badek adalah pemukiman warga dengan nama Kampung Pojok
12	Fotocopy ijazah	Bukti yang menunjukkan bahwa sebelum dikuasai oleh PTPN XII ada fasilitas publik yakni sekolah yang dibuktikan oleh fotocopy ijazah atas nama Suwidji
13	Surat Keterangan batas tanah Dipo Sulaksono	Surat keterangan yang menunjukkan batas tanah milik Dipo Sulaksono tahun 1930
14	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumini tahun 1960	Bukti yang menunjukkan jika dulu wilayah tersebut masuk kedalam administrator Desa Djarak
15	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiran tahun 1960	Bukti yang menunjukkan jika dulu wilayah tersebut masuk kedalam administrator Desa Djarak
16	Akte Belanda	Akte Belanda yang menunjukkan tanah Verbonding 147
17	Akte Belanda	Akte Belanda yang menunjukkan tanah Verbonding 117
18	Akte Belanda	Akte yang menunjukkan total luasan lahan milik Perkebunan Belanda
19	Akte Belanda	Akte Belanda yang menunjukkan Verbonding Babadan sebelum menjadi PTPN XII Ngrangkah Pawon
20	Foto pondasi rumah warga	Foto yang membuktikan bahwa lahan perkebunan PTPN XII Ngrangkah Pawon adalah perkampungan warga
21	Foto perkampungan warga	Foto yang menunjukkan bahwa wilayah Dusun Badek dan Dusun Gatok sudah didiami warga kurang lebih 40 tahun

(Sumber : dokumen Serikat Tani Tunggul Wulung)

5.2.2 PTPN XII adalah lawan

Dalam kaitannya dengan gerakan sosial pasti ada lawan yang menjadi pihak yang kontra dengan aksi gerakan yang dilakukan, hal ini pun juga berlaku dalam pembentukan *framing*. Adanya lawan yang juga dapat menjadikan sebuah gerakan menjadi lebih solid, karena orang – orang yang bersatu mempunyai pandangan yang sama yakni adanya pihak yang harus dilawan agar tujuan bersama dapat terpenuhi. Dalam kasus ini, Serikat Tani Tunggul Wulung berpendapat permasalahan tanah di Desa Sepawon adalah bagian dari kesalahan pihak PTPN karena telah mengeklaim tanah yang ditinggali masyarakat adalah bagian dari HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon. Sedangkan dalam pandangan

masyarakat, tanah di Desa Sepawon adalah milik masyarakat yang sudah ditempati berpuluh – puluh tahun, sejak masa Belanda, dan jauh sebelum PTPN

XII mengambil alih.

Serikat Tani Tunggul Wulung merasa bahwa usaha mendapatkan kejelasan legalitas tanah dihalang – halangi pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon karena tidak adanya diskusi bersama dalam menyelesaikan kasus tanah tersebut. Sebenarnya di dalam SK Mendagri No : SK.11/HGU/DA/87 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PTPN XII Ngrangkah Pawon, dalam ketentuan Nomor empat (4) ayat tiga (3) menjelaskan :

“apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah dan belum mendapat penyelesaian, maka kewajiban / tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku”.

Namun dari pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon tidak melakukan diskusi dengan masyarakat mengenai tanah garapan dan perkampungan yang merupakan tanah yang dibabat oleh masyarakat dan bukan merupakan bekas perkebunan Belanda. Sikap PTPN XII Ngrangkah Pawon atas adanya SK Mendagri tersebut justru digunakan semena –mena dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah aset PTPN XII Ngrangkah Pawon dan menutup diskusi dari permasalahan tanah garapan masyarakat. Dengan adanya sikap dari pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon yang tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk mencari kejelasan mengenai status tanah perkampungan dan garapan warga membuat masyarakat dirugikan sampai saat ini karena tanah yang ditempati secara turun- temurun tidak ada bukti legalitas.

“ini tanah sudah dari puluhan tahun lalu di tempati masyarakat, sebelum ada PTPN juga. Terus akhirnya dikelola negara kan bekas dari pabrik Belanda, tapi sebelum itu ada kesepakatan mengecualikan tanah tempat tinggal ini. Di inklafkan dari HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon tahun 1987” (wawancara 5 Januari 2019)

Walaupun rasa kekecewaan yang tinggi kepada PTPN XII Ngrangakah

Pawon, namun dengan alasan hidup berdampingan di areal yang sama dengan

pihak PTPN XII, Serikat Tani Tunggul Wulung maupun masyarakat tetap menjaga sikap agar tidak terjadinya konflik besar antara masyarakat dan pihak

PTPN XII Ngrangakah Pawon. Dalam implementasi menjaga sikap ini, jalur yang ditempuh adalah melalui hukum yang berlaku dan menghindari diri untuk melakukan tindakan anarkis.

“Kita memang berhati – hati dalam melangkah, kita ikuti saja hukum yang berlaku. Kita gak mau gegabah terus malah nanti timbul konflik besar disini. Gak bisa dipungkiri mbak, kami hidup berdampingan dengan pabrik udah lama, masyarakat banyak juga yang kerja ikut pabrik. Kalau anarkis takutnya malah yang rugi kita” (wawancara 5 Januari 2019)

5.2.3 Pengaruh *Framing* kepada Masyarakat

Media *Framing* yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung kepada masyarakat dengan menggunakan sosialisasi baik secara kolektif maupun personal. Masyarakat dikumpulkan dan diberi penjelasan pentingnya legalitas tanah, serta pemaparan dari program pemerintah mengenai PRONA yang salah satunya mempermudah mekanisme pengajuan sertifikat tanah, serta peluang jika dilakukan pengajuan secara kolektif akan lebih berhasil mengingat kondisi satus tanah Desa Sepawon yang rumit karena masuk ke areal PTPN XII Ngrangakah Pawon. Sosialisasi yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dilakukan dua kali, pertemuan pertama membahas mengenai keikutsertaan masyarakat pada pengajuan kolektif dan pada pertemuan kedua membahas biaya pengajuan yang sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Kediri yang menyarankan untuk melakukan pengurusan administrasi terlebih dahulu.

Hasil dari sosialisai yang dilakukan pada dua dusun tersebut menghasilkan keikutsertaan masyarakat untuk melakukan pengajuan sertifikat tanah sebesar 496 KK yang terdiri dari warga Desa Badek dan Gathok. Tidak semua warga yang ada dii dua dusun tersebut ikut serta dalam pengajuan, bagi warga yang menolak ikut mempunyai pandangan

“Mustahil. Negara di lawan. Kalau saya milih nggak ikut, uang pengajuan bisa ditabung. Sekarang dilihat aja lah Mbak, ini berhasil atau nggak, yaa kalau menurut saya juah dari kata berhasil”

Namun berbeda dengan masyarakat yang ikut serta dalam pengajuan, menganggap bahwa ini adalah solusi dari kekhawatiran mereka mengenai status tanah tempat tinggal yang selama ini ditempati. Adanya program pemerintah yang mendukung, kelompok masyarakat yang mewadahi membuat masyarakat memberanikan diri untuk juga ikut serta dalam pengajuan tanah.

5.3 Mobilisasi Sumberdaya

Konsep mobilisasi sumberdaya berfokus pada usaha kelompok menyupayakan sumberdaya yang dimiliki demi tujuan perubahan sosial dan juga tujuan kelompok tersebut, Edwards dan McCarthy dalam (Hidayat, 2012, hal. 122). Sumberdaya yang dimaksud adalah hal – hal yang punya peranan yang berefek pada keberhasilan gerakan. Sumberdaya itu sendiri ada beberapa hal, menurut Della Porta dan Diani dalam (Manulu, 2009), perkembangan suatu gerakan tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penggerak sumberdaya tersebut, antara lain peran dominasi organisasi, kader, dan kepemimpinan.. Kekuatan gerakannya tergantung pada tersedianya sumber daya baik sumber daya material (seperti usaha, uang, keuntungan konkret, dan jasa) maupun sumberdaya non material (seperti otoritas, kepercayaan dan persahabatan) di dalam organisasi tersebut.

Dimensi struktur mobilisasi ada dua jenis yakni formal dan informal. Formal meliputi gerakan atas jaringan resmi seperti organisasi keagamaan maupun lembaga – lembaga gerakan yang ada pada tempat kerja maupun sekolah.

Sedangkan dimensi informal meliputi gerakan dengan bentuk yang tidak resmi seperti jaringan gerakan atas dasar kekerabatan, pertemanan, dan kesamaan tempat tinggal. Dalam kaitannya pada penelitian ini, Serikat Tani Tunggal Wulung adalah bentuk dari jaringan gerakan informal, karena dasar dari

munculnya gerakan ini adalah kesamaan nasib dari status tempat tinggal, ini pun juga tidak terlepas karena adanya ikatan pertemanan.

5.3.1 Peran Sentral Ketua Serikat Tani Tunggul Wulung

Sumberdaya non material yang kental dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Legimin dalam mengatur organisasi dan pembuatan strategi, adanya keterikatan emosional baik di dalam Serikat Tani Tunggul Wulung maupun dengan masyarakat yang sedang mengupayakan legalitas tanahnya, solidaritas antar pengurus, kepercayaan yang tinggi kepada ketua. Dalam hal ini, Legimin mampu membangun relasi yang baik dalam membuat masyarakat percaya dan bisa membuat Serikat Tani Tunggul Wulung melakukan gerakan.

Seikat Tani Tunggul Wulung adalah organisasi pertama di Desa Sepawon yang melakukan gerakan pengupayaan legalitas tanah, namun bukan menjadi yang pertama dalam menjadi gerakan pengajuan tanah. Isu tanah bukan menjadi isu yang baru lagi di Desa Sepawon, keinginan mendapatkan legalitas tanah sudah menjadi diskusi di kalangan masyarakat, ini pun yang membuat adanya tuntutan atas tanah HGU milik PTPN XII Ngrangkah Pawon yang diajukan oleh beberapa warga Desa Sepawon, khususnya di daerah Dusun Ngarangkah yakni dua kali di dalam pengadilan perdata, namun mengalami kegagalan. Kepemimpinan Legimin mampu membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat dengan membentuk organisasi serikat Tani Tunggul Wulung ditengah keragu-raguan kegagalan pada gerakan yang lama.

Kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari latar belakang Legimin yang sudah biasa menjadi pemimpin dan dihormati karena dirasa mempunyai kharisma yang sangat kuat sehingga orang banyak yang segan. Legimin pernah menjabat sebagai Kepala kampung jabatan ini dibuat khusus oleh pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon. Tugas dari Kepala kampung pada umumnya sama seperti

kepala dusun jika disandingkan dengan pemerintahan desa, namun yang menjadi pembeda adalah kepala kampung bertugas menjadi pemhubung pihak pabrik dan masyarakat atau sebaliknya. Sehingga jabatan kepala kampung hanya diberikan kepada orang yang bisa mengatur warga sekaligus menjadi orang kepercayaan pabrik. Beberapa keorganisasian juga diikuti, Legimin baik di Dalam Desa maupun diluar Desa. Legimin menjabat dua periode sebagai ketua LPMD Desa Sepawon dari tahun 2011-2020, mengikuti kelompok Gapoktan, dan beberapa kali ikut serta dalam pertemuan diskusi terkait gerakan dan lingkungan.

“Pak Legimin itu sudah biasa mimpin, dulu ya jadi polo kampung yang ngangkat langsung pihak pabrik, orang kepercayaan pabrik lah. Eh malah sekarang jadi ketua buat ngelawan pabrik hehehe. Emang kalau Pak Legimin paling pas buat mimpin ini (Serikat Tani Tungul Wulung) orangnya aktif di desa sama di luar juga, jadi bisa nyari bantuan biar ini cepet tembus lah” (wawancara 8 Desember 2019)

Alasan lainnya yang melatarbelakangi para pengurus dan warga yang ikut pengajuan sertifikat tanah percaya kepada Legimin sebagai ketua Serikat Tani Tungul Wulung adalah masalah latar belakang ekonomi Legimin. Ekonomi yang baik dan ditambah rasa royal yang tinggi membuat warga menaruh kepercayaan karena tidak adanya pungutan uang baik transport maupun akomodasi ketika melakukan pengupayaan advokasi beberapa pihak baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbeda dengan gerakan sebelumnya yang meminta iuran kepada masyarakat sebagai bentuk bantuan pengurusan yang ada, sehingga ketika gerakan yang lama mengalami kegagalan, warga menjadi kecewa. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang kebanyakan menengah kebawah, sehingga uang menjadi pertimbangan yang sangat besar.

“Pak Gimin itu kan bos besar, pengepul buah. Ambil buah dari kebun warga sini ya diluar juga., terus dijual ke kota kota sana mbak. Uangnya banyak, baik juga, warga sini yang biasa jual buah ke Pak Gimin kadang hutang juga gampang. Jadi banyak temennya mbak. Ngurus masalah tanah, mau ke malang sampek ke jakarta itu juga pakai uang pribadinya Pak Gimin mbak. Royal pokoknya gak minta ngumpulin iuran” (wawancara 8 Desember 2019)

Pembentukan pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung juga tidak terlepas

karena adanya alasan solidaritas dan kepercayaan kepada Legimin. Empat dari

lima pengurus yang terpilih adalah orang yang sebelumnya mempunyai kedekatan yang kuat dengan Legimin, sedangkan satu orang pengurus lainnya dipilih oleh pendamping LSM. Dalam melakukan pendekatan kepada calon pengurus, Legimin melakukan dengan cara personal mendatangi ke rumah masing – masing pengurus untuk berdiskusi.

“Pak Gimin datang kerumah ‘*aku pengen mlaku ngene, corone ngene awakmuu gelem gak*’ Ya tetap mau saya sudah tahu karakternya dia kan sudah dari kecil. Ya Pak legimin percaya sama saya, saya percaya sama Pak legimin gitu mbak. Saya sudah tahu karakternya mbak ya loyal ya semangat. Pak Gimin itu nggak mungkin nunjuk orang kalau gak dirasa orang itu mampu, tapi ya dibalikin ke saya. Ini kan masalahnya sukarela, gak ada bayaran, gak tau sampai kapan” (wawancara 8 Desember 2018)

Hal lain yang paling menonjol ketika kegiatan wawancara penelitian berlangsung adalah adanya kehati-hatian bahkan terkesan tertutup yang disampaikan pengurus lain untuk menjawab pertanyaan saat wawancara. Hampir semua pengurus menjawab “*langsung tanyakan ketua saja mbak, saya takut salah menjelaskan*”. Respon tersebut tidak lain tidak bukan untuk menghindarkan diri jika jawaban yang diberikan memicu konflik maupun disalahgunakan dari pihak lawan untuk menjatuhkan organisasi. Maka kepemimpinan sentral demokrasi diambil dalam Serikat Tani Tunggul Wulung, jawaban difokuskan di satu orang yakni ketua. Hal ini dijelaskan oleh pendamping dari LSM

“Karna mereka sudah terbiasa sentral demokrasi, bahwa segala informasi ini diserahkan ke ketuanya mereka, tapi kalau untuk bicara internal organisasi mereka masih berjalan. Mereka hidup dibawah tekanan itu puluhan tahun, jadi kalau berbicara hal yang menurut mereka penting, mereka selalu seperti itu, ke semua temen temen media juga gitu, jadiya dilempar lempar , jadi mereka sangat berhati hati sekali kalau berbicara mengenai data. Justru ditengah tengah mereka sendiri, mereka punya lawan” (wawancara 5 Januari 2019)

Mengenai jalannya kepengurusan Serikat Tani Tunggul Wulung terlihat kurang berjalan dengan maksimal. Ini terlihat dari kegiatan wawancara dan observasi peneliti kepada masing – masing pengurus. Data berkas dan pembukuan

yang menjadi tugas dari sekretaris, dihandel langsung oleh ketua, begitupun dengan jabatan penasehat yang kurang dimaksimalkan dan ketika proses wawancara terang – terangan menjawab bahwa namanya hanya dipakai sebagai pelengkap pengurus organisasi dan tidak ada tugas yang diberikan maupun dilakukan sesuai dengan jabatannya tersebut.

Selain sumberdaya non materiil yang terlihat di Serikat Tani Tunggul Wulung, sumberdaya materiil juga, yakni Legimin berhasil membentuk sistem, yakni struktur organisasi dalam Serikat Tani Tunggul Wulung berlandaskan hukum yang jelas. Ini adalah organisasi pertama yang mempunyai tujuan perjuangan tanah di Dusun Badek dan Babadan. Komponen penunjang lainnya juga dibentuk, berupa pembentukan kantor sekretariatan dan infentaris kantor. Kantor sekretariatan ini dijadikan tempat untuk melakukan diskusi maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pengajuan tanah. Sedangkan untuk permasalahan penghimpunan dana, Serikat Tani Tunggul Wulung lebih memilih memakai dana pribadi pengurus, karena merasa yang dijalankan atas dasar perjuangan dan tidak mau memberatkan masyarakat.

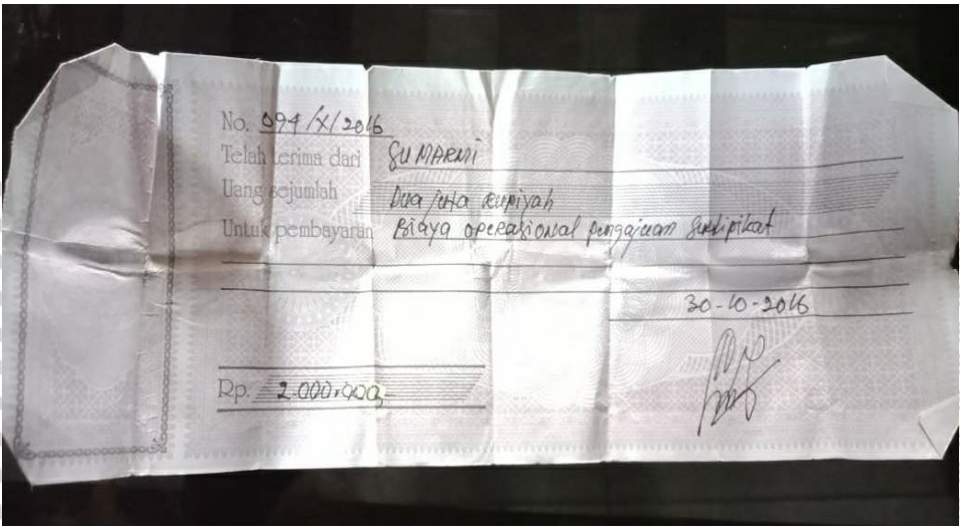
“Kantor kami jelas, ada plang namanya juga. Kami juga ada dasar hukumnya, pembukuan tercatat rinci. Intinya kami menjelaskan entah kepada pihak PTPN atau masyarakat bahwa niat kami serius tentang apa yang sedang kami perjuangkan. Semua orang boleh langsung ke kantor, tanya tanya monggo, tidak ada yang sembunyi sembunyi” (wawancara 8 Desember 2018)



Gambar 5 - Kantor Kesekretariatan Serikat Tani Tunggul Wulung

(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Dana yang menjadi satu – satunya dihimpun oleh Serikat Tani Tunggul Wulung adalah biaya pengajuan tanah untuk masing – masing tempat tinggal warga. Besaran biaya tersebut adalah Rp 250.000,00 per are, yang digunakan dalam pengurusan pengajuan, baik berupa pengisian formulir, materai, dan pengurusan di BPN Kabupaten Kediri. Rata – rata masyarakat mengeluarkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 samapai Rp. 3.000.000,00. Hal yang menjadi pembeda dengan gerakan sebelumnya adalah warga tidak perlu melakukan iuran dana yang diberikan untuk kepentingan orang yang membantu masyarakat untuk mengurus tuntutan. Sedangkan dana untuk melakukan advokasi ke beberapa tempat baik di dalam kota maupun di luar kota dibebankan pada dana pribadi masing – masing pengurus.



Gambar 6 - Bukti Pembayaran Pengajuan Sertifikat Tanah
(Sumber : Dokumentasi peneliti)

Pemanfaatan media sosial seperti group chat, Instagram, Facebook untuk menunjang gerakan tidak dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengurus menggunakan media sosial, dengan alasan tidak mempunyai *handphone* yang mempunyai. Sehingga untuk melakukan diskusi membahas proses yang akan ditempuh Serikat Tani Tunggul Wulung, harus dilakukan secara langsung, dengan bertamu ke rumah pengurus dan menjadwalkan rapat.

“Nggak pakek HP. Pokok kalau mau rapat ya biasanya Pak Legimin kesini dulu ‘ayo kumpul’ rumahnya juga deket, nggak perlu HP, soalnya nggak bisa” (wawancara 8 Desember 2018)

5.3.2 Pemanfaatan jaringan pendukung

Munculnya gerakan sosial dan capaian dari suatu aktivisme dipandang sebagai hasil dari proses yang terbuka dan dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi, dan keputusan yang tentu dipilih oleh para aktor dalam konteks relasi kuasa dan interaksi konfliktual yang ada (Sukmana, 2016). Serikat Tani Tunggul Wulung bukan hanya memanfaatkan sumberdaya materiil dan non materiil yang berada pada lingkungannya, namun juga membangun komunikasi terhadap perluasan jaringan. Salah satu yang dilakukannya adalah meminta pendampingan

LSM untuk membantu penyelesaian masalah dan penyusunan strategi yang efektif yang sesuai dengan karakter masyarakat yang ada di Dusun Badek dan Gatok

“Jadi gini, kalau di Serikat Tani itu polanya emang aku rubah, aku tidak menggunakan pola - pola lama, pola ortodoks itu, aksi jalan dan apalah itu. Warga Badek kesadarannya dengan warga Sempu itu beda, warga Sempu itu *kendel kendel* tapi kalau bicara tentang ranah hukum mereka kosong, tapi beda, temen - temen Badek itu kesadarannya lebih terbangun tapi mentalnya belum. Jadi gak berani warga Badek turun ke jalan aksi seperti itu, perlawanan mereka ya ikut jalur hukum yang udah ada” (wawancara 5 Januari 2019)

Strategi politik yang sempat digunakan Serikat Tani Tunggul Wulung adalah melakukan pendekatan kepada Bu Khofifah yang pada saat itu baru saja terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur. Perwakilan dari Serikat Tani Tunggul Wulung mendatangi kediman kemenngan Bu Khofifah dan melakukan diskusi mengenai permasalahan tanah yang sedang dihadapi warga dengan PTPN XII Ngrangh Pawon. Dari pertemuan tersebut, warga mendapat dukungan dan saran langsung menemui Presiden Jokowi, karena masuk kedalam timses.

“Sempet ke Bu khofifah, didukung tapi bilang ‘*kalau nunggu saya pasti penangannya lama, soalnya nunggu saya dilantik. Bapak langsung ke Pak Jokowi saja, karna kan bapak ini orangnya Pak Jokowi*’ Terus akhirnya ikut JPKP itu” (wawancara 7 Desember 2018)

Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) lahir dari relawan Jokowi, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pemerintah yang optimal. Serikat Tani Tunggul Wulung, yang didampingi anggota LSM yang bernama Nanik Haryanti ikut kedalam JPKP dengan tujuan agar kendala yang dihadapi masyarakat bisa didengar sampai tingkat pusat. Atas kesempatan tersebut, Serikat Tani Tunggul Wulung beserta 5 perwakilan daerah lain yang mempunyai permasalahan agraria mendatangi Istana Presiden dan menyampaikan langsung kepada Staf Kepresidenan mengenai permasalahan masing - masing.

Usaha yang ditempuh oleh Serikat Tani Tunggul Wulung berupa penyampaian masalah dan berdiskusi mengenai solusi yang tepat yang bisa

diambil dalam kasus tersebut. Karena kasus tanah di Desa Sepawon adalah kasus yang alot, sama seperti kebanyakan kasus agraria yang menyeret masyarakat sipil dan badan pemerintah lainnya. Serikat Tani Tunggul Wulung sudah berdiskusi dengan DPRD Komisi 3 Jawa Timur, Satgas Agraria, dan Dirgen Kekayaan Negara, namun sampai sekarang belum ada hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, karena pihak PTPN XII bersikukuh bahwa tanah yang ditempati di Dusun Badek dan Gatok masuk kedalam aset mereka. Sedangkan disatu sisi masyarakat dengan atas dasar sejarah tanah yang ditempati bertahun-tahun mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dikecualikan dari HGU, dan tidak termasuk kedalam aset PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Peran pendamping yakni Nanik Haryanti membantu dalam akses advokasi kepada beberapa pihak. Ini tidak lain karena pengalaman dari beliau yang beberapa kali membantu mendampingi kasus sengketa tanah, yang salah satunya juga berkaitan dengan PTPN XII Ngrangkah Pawon, yakni masyarakat Sempu. Dalam konteks intelektual, Nanik Haryanti yang mempunyai pekerjaan utama sebagai seorang advokat, juga melakukan keikutsertaan di beberapa LSM lingkungan, seperti Ratu Adil dan AGRA. Hal tersebut menurutnya sebagai dorongan untuk membantu masyarakat kecil yang tidak berdaya. Untuk masalah tanah yang kaitannya langsung dengan BPN Kabupaten Kediri, nama Nanik Haryanti tidak asing lagi.

“Mbak Yanti yang ngoordinir. Udah kenal kita satu sama lain. Kan kasusnya bukan cuma yang ini saja. Jadi pas kesini (Nanik Haryanti) marah – marah mempertanyakan kasusnya, yaa langsung saya ajak ke ruangan. Sudah kenal kan intinya, ngobrol santai” (wawancara 5 Januari 2019)

Penyusunan strategi advokasi tidak terlepas dari campur tangan Nanik Haryanti yang mempunyai akses yang cukup terbuka untuk melakukan *lobbying* karena

peluang dari pekerjaannya, baik pekerjaan utama maupun koneksi dari LSM yang digelutinya.

“Saya bersyukur punya banyak teman yang bisa saya andalkan untuk membantu saya. Jadi kalau mau kesini, langsung kepikiran ‘oh harus menghubungi si ini’ enak punya koneksi banyak” (wawancara 10 Januari 2019)

5.4 Keterkaitan antar Strategi

Serikat Tani Tunggul Wulung tidak serta merta lahir tanpa sebuah proses, sama halnya dengan semua kelompok gerakan sosial yang lainnya. Ada faktor – faktor yang melatarbelakangi gerakan Serikat Tunggul Wulung muncul dan berkembang yang akhirnya mampu menarik simpatisan sebesar 496 KK dari dua dusun, Badek dan Gathok. Walaupun gerakan ini hanya menggerakkan dua dusun saja, dari total ada empat dusun yang belum mendapatkan legalitas tanah, namun hal ini tetap sebuah keberhasilan jika melihat dari sejarah gerakan yang ada pada Desa Sepawon sebelumnya, yakni dua kali kegagalan dengan permasalahan yang sama. Ini pun yang menarik perhatian dari peneliti untuk melihat strategi yang digunakan Serikat Tani Tunggul Wulung untuk menggerakkan masyarakat melakukan pengajuan sertifikat tanah.

Program pemerintah pada era Jokowi mengenai reforma agraria dan PRONA sangat disorot oleh media massa, tidak sedikit media yang menyiarkan pemberian sertifikat gratis untuk rakyat. Hal itu akhirnya mempengaruhi elite politik di Desa Sepawon untuk melakukan suatu gerakan yakni membentuk Serikat Tani Tunggul Wulung. Disisi lain *framing* media mengenai PRONA (Program Nasional Agraria) dimanfaatkan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung untuk membentuk identitas gerakan, yakni usaha yang dilakukan adalah sesuai dengan program pemerintah dajin siapapun yang menghalangi upaya pengajuan tersebut adalah pihak yang salah.

Identitas yang dibentuk oleh Serikat Tani Tunggul Wulung dimanfaatkan untuk menarik simpatisan yakni masyarakat Badek dan Gathok dnegan melalui

media sosialisasi. Efektifitas sosialisasi yang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung untuk menarik masyarakat untuk bergabung dalam pengajuan tanah tidak

terlepas dari sosok tokoh desa, yang tidak lain menjabat sebagai ketua Serikat Tani Tunggul Wulung. Sosok yang tidak asing menjadi seorang pemimpin, karena dulunya kepala kampung sehingga disegani masyarakat. Dari sisi pengoptimalan struktur keorganisasian seperti kantor keekretariatan, pembukuan, rincian pengelolaan dana dari uang pengajuan, serta adanya pendampingan dari LSM yang membantu dalam penyusunan strategi advokasi kepada badan terkait yang akhirnya membuat masyarakat percaya untuk ikut bergabung dalam pengajuan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Terbentuknya perlawanan masyarakat Desa Sepawon, khususnya di Dusun Badek dan Gathok yang tergabung dalam Serikat Tani Tunggul Wulung, permasalahan tersebut dilatarbelakangi karena sengketa lahan di areal PTPN XII Ngrangkah Pawon. Permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh lahan peninggalan Belanda yang ditempati masyarakat dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1958, yang kemudian berganti kepada pihak PTPN XII Ngrangkah Pawon. Masyarakat menuntut hak legalitas tanah tempat tinggal dengan dasar bahwa tanah yang ditempati secara turun temurun itu lebih dahulu ada sebelum PTPN XII ada, dan adanya kesepakatan mengecualikan tanah perkampungan warga dari HGU PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Masyarakat Dusun Badek dan Gathok mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani di lingkungan pabrik. Dalam sisi perekonomian legalitas tanah ini menjadi suatu yang diharapkan masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya, seperti melakukan usaha kredit rakyat dan sebagainya. Dalam ranah pemerintah Desa Sepawon, adanya kejelasan legalitas tanah juga menjadi harapan besar di dalam pengurus desa karena tanpa adanya legalitas tersebut, membuat pemasukan pajak yang diterima oleh Desa Sepawon hanya diperoleh dari Dusun Petung Ombo saja yang membuat pemasukan desa sangat kecil namun harus tetap dialokasikan kepada lima dusun.

Sebagai aksi dalam menuntut hak, Serikat Tani Tunggul Wulung yang memfasilitasi warga yang ikut serta pengajuan tanah melakukan beberapa tindakan untuk segera mencapai tujuan mereka yakni mendapatkan sertifikat tanah. Hal – hal yang dilakukan antara lain adalah mendatangi komisi II DPRD Jawa Timur untuk membahas masalah tanah di Sepawon, mendatangi BPN

Kabupaten Kediri untuk melakukan pengajuan legalitas tanah, diskusi dengan satgas agraria, melakukan pendekatan politik kepada Bu Khofifah selaku

Gubernur Jawa Timur, ikut kedalam JPKP sehingga bisa langsung menyuarakan permasalahan tanah kepada Staf Presiden. Ada tiga faktor untuk menganalisis kemunculan dan perkembangan Serikat Tani Tunggul Wulung, yakni struktur kesempatan politik, *framing* (pembingkaihan), dan mobilisasi sumberdaya.

Struktur kesempatan politik memiliki pengaruh terhadap terhadap faktor perubahan politik di Indonesia mengenai keterbukaan maupun ketertutupan suatu sistem politik yang mana mempengaruhi berkembang atau tidaknya sebuah gerakan sosial. Sejak era orde baru, sebenarnya diskusi mengenai status tanah di Desa Sepawon sudah terjadi, namun tidak ada pergerakan dari masyarakat karena rasa takutnya pada rezim era tersebut dan juga karena menunggu HGU PTPN XII berakhir, pada kontrak HGU tanggal 6 Mei 1987 samapi 31 Desember 2012.

Namun pada era reformasi, warga memberanikan diri untuk melakukan tuntutan, ini terjadi pada tahun 2010 dan 2012 yang mana ada dua tuntutan hingga masuk ke hukum perdata, namun akhirnya mengalami kegagalan karena di dalam hukum, tanah yang menjadi tuntutan masyarakat masuk kedalam HGU PTPN XII Ngarangkah Pawon. Berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Jokowi pada jilid pertama, beberapa elite politik di Dusun Badek dan Gathok melakukan pergerakan yang lebih tersukruttur dan mempunyai landasan hukum, dengan membentuk Serikat Tani Tunggul Wulung di akhir tahun 2015. Keberanian membentuk organisasi juga tidak terlepas pada kebijakan pemerintah dan citra pemimpin Jokowi yang dirasa lebih merakyat dan jauh dari sisi militan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan gerakan yang pada dasarnya sejalan dengan kebijakan agraria yang sedang diprioritaskan.

Framing (Pembingkaihan) yang dilakukan oleh Serikat Tani Tunggul Wulung antara lain membingkai isu permasalahan, mengidentifikasi korban dan

yang bersalah, dan membentuk pandangan bahwa yang dilakukan adalah hal benar. Isu permasalahan mengenai status tanah yang sudah lama ada dibahas

kembali dan dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengajuan status tanah. Dalam hal ini juga Serikat Tani Tunggul Wulung mengidentifikasi siapa yang akan merugi jika tidak ada status tanah yang jelas dan mungkin sewaktu – waktu akan terusir dari tempat tinggal yang sudah ditempati secara turun temurun. Jika masyarakat diidentifikasi pada posisi terepresi, maka ada posisi yang diidentifikasi sebagai pihak yang merepresi yakni PTPN XII Ngrangkah Pawon karena telah mempersulit masyarakat mendapatkan hak legalitas tempat tinggal.

Mobilisasi sumberdaya dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya materiil dan non materiil. Sumberdaya materiil berupa pembentukan organisasi Serikat Tani Tunggul Wulung, kantor kesekretariatan, dan perkumpulan rutin setiap melakukan perjalanan advokasi. Sumberdaya non materiil berupa peran sentral kepemimpinan Legimin yang mempunyai pengaruh besar dalam perekrutan pengurus Serikat Tani Tunggul Wulung, menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengajuan tanah, membangun kepercayaan di dalam pengurus maupun di masyarakat. Hal lain yang menjadi penting adalah strategi yang diambil oleh serikat Tani Tunggul Wulung yang melakukan pendekatan politik hukum seperti melakukan *audinci* dengan komisi II DPRD Jawa Timur, BPN Kabupaten Kediri, Satgas Agraria, dll. Cara yang lain yang Serikat Tani Tunggul Wulung gunakan adalah cara politik dengan menggunakan posisi politik mereka, yakni melakukan pendekatan ke Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur dan JPKP organisasi yang lahir dari relawan Jokowi, agar bisa menyampaikan permasalahan tanah sampai ke tingkat nasional.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang ditujukan kepada Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan kepada Serikat Tani Tunggul Wulung antara lain :

1. Kasus mengenai sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dan pihak PTPN bukan lagi kasus yang bisa dibiarkan, karena melihat dari kuantitas masalah yang terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa ini masalah yang harusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah. Negara harusnya bisa tegas dan memberikan solusi dengan kasus yang sama, bisa dituangkan dalam kebijakan maupun peraturan. Dalam proses mekanisme dilapangan pun harus dilakukan dengan tegas agar tidak ada tumpang tindih peraturan yang akhirnya membuat masyarakat bingung.
2. Regulasi di pemerintah pusat maupun daerah harusnya lebih dibuat jelas, ini pun menjadi catatan bahwa banyak kasus dimana masyarakat berusaha melakukan advokasi ataupun melakukan diskusi terbuka yang ditujukan ke badan pemerintahan untuk menyelesaikan kasus agraria namun pada kenyataannya regulasinya diperumit dan dilempar – lempar.
3. Serikat Tani Tunggul Wulung harusnya lebih memperbaiki dalam permasalahan kepengurusan, karena peran ketua mendominasi disegala jabatan. Serta lebih sering melakukan pertemuan dengan masyarakat yang notabennya adalah orang yang ikut pengajuan sertifikat tanah, karena masyarakat kurang mengetahui perkembangan proses yang sedang dilakukan Serikat Tani Tunggul Wulung, yang mana hal ini bisa memicu turunnya kepercayaan pada organisasi Serikat Tani Tunggul Wulung. Saran terakhir untuk Serikat Tani Tunggul Wulung adalah mengikutsertakan anak muda dalam gerakan perjuangan ini, agar adanya regenerasi dari kaum muda, mengingat usia pengurus yang masuk katagori tua, yakni 47-60 tahun. Adanya keikutsertaan anak muda juga akan berdampak pada eksistensi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, C. N. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Adi, A. P. (2017). *Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus : Gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang)*. Surabaya: Universitas Airlangga.

AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria). (2017). *Warga Desa Sepawon, Kediri-Jawa Timur Adukan PTPN XII ke Komnas HAM*.
agraindonesia.org.

Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ari Ganjar Herdiansah, R. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 54.

Bandur, A. (2014). *Penelitian Kualitatif (Metodologi, Desain, & Teknik Analisis Data dengan NVIVO10)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

BKKBN. (1994). *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan UUNo.10 Tahun 1992 dan GBHN tahun 1993*. Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Perdana Media Group.

Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dimpos, M. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak VS PT Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gafar, A. (2006). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hakim, M. L. (2018). Gerakan sosial Nahdlatul Ulama: Studi kasus Pengurus Cabang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3.

Halili. (2006). Masa Depan Civil Society di Indonesia : Prospek dan Tantangan. *Jurnal Civics*, 94.

Hasan, F. (2016). *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hidayat, D. (2012). Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 119.

Irawati. (2012). *Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal*. Padang: Universitas Andalas.

Irawati. (2012). *Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal*. Padang: Universitas Andalas.

Kartaprawira, R. (2007). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

Komariah, D. S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2021, 01 17). Dipetik 02 22, 2021, dari Anomali Capaian Reforma Agraria di Masa Pandemi: <http://kpa.or.id>

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2021, 01 06). *Konsorsium Pembaruan Agraria*. Dipetik 02 22, 2021, dari Catatan Akhir Tahun 2020 KPA Edisi I : Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi: <http://kpa.or.id>

Kuwado, F. J. (2018, 08 30). Dipetik 02 18, 2019, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>

LKPP. (2018, Juni 8). Dipetik Februari 22, 2020, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia: <http://www.jdih.lkpp.go.id>

Manulu, D. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak VS PT Indrayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardalis. (2007). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Meleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Misbahuddin, I. H. (2013). *Aanalisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumin Aksara.

Muktiali, R. M. (2013). Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol. 1 No. 2*, 160.

Nuridin, I. (2017). *Mempercepat Reforma Agraria*. Kompas.com.

Peraturan Presiden (PERPRES) . (2018, September 27). *Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Reforma Agraria*. Dipetik Februari 22, 2020, dari : LN.2018/NO.172, LL SETKAB : 28 HLM

PTPN XII Ngrangkah Pawon. (2019, juli 9). Dipetik september 5, 2019, dari PTPN XII: <http://www.ptpn12.com>

Riza, Z. (2010). Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Persektif Politik Agraria. 7.

Sahdin, A. (2020). *Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Singkil Versus Pt.Nafasindo)*. Banda

Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Saldana, M. H. (2014). *Qualitative data Analysis*. USA: Library of Congress Cataloging.

Setiawan, U. (2019, 10 9). Dipetik 5 7, 2020, dari kompas: <http://kompas.com>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru Indonesia : Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9-12.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Suyudi. (2012). Peran Birokrasi Bagi Suatu Organisasi. *Jurnal Media Aplikom*, 35-36.

Syawaludin, M. (2016). Perlawanan Petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera-Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.

